



UNIVERSITAS INDONESIA



**PERAN PRANCIS MASA MITTERAND
SEBAGAI ANGGOTA TETAP DEWAN KEAMANAN
PERSERIKATAN BANGSA-BANGSA:
STUDI KASUS APARTHEID AFRIKA SELATAN**

SKRIPSI

JEANNE FRANÇOISE

NPM: 0606089024

**FAKULTAS ILMU PENGETAHUAN BUDAYA
PROGRAM STUDI SASTRA PRANCIS
DEPOK
JULI 2010**



UNIVERSITAS INDONESIA

**PERAN PRANCIS MASA MITTERAND
SEBAGAI ANGGOTA TETAP DEWAN KEAMANAN
PERSERIKATAN BANGSA-BANGSA:
STUDI KASUS APARTHEID AFRIKA SELATAN**

SKRIPSI

**Diajukan sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar
Sarjana Humaniora**

**JEANNE FRANÇOISE
NPM: 0606089024**

**FAKULTAS ILMU PENGETAHUAN BUDAYA
PROGRAM STUDI SASTRA PRANCIS
DEPOK
JULI 2010**

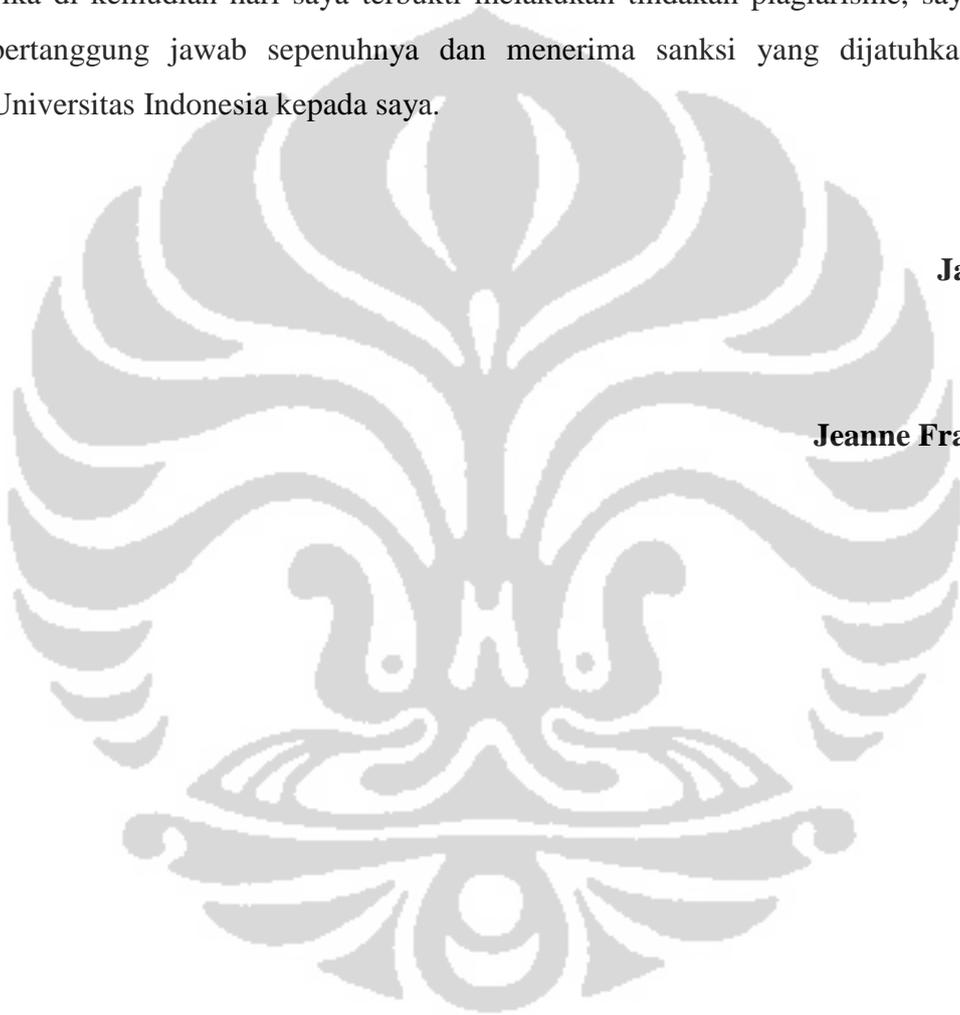
PERNYATAAN BEBAS PLAGIARISME

Saya yang bertanda tangan di bawah ini menyatakan bahwa skripsi ini saya susun tanpa tindakan plagiarisme sesuai dengan peraturan yang berlaku di Universitas Indonesia.

Jika di kemudian hari saya terbukti melakukan tindakan plagiarisme, saya akan bertanggung jawab sepenuhnya dan menerima sanksi yang dijatuhkan oleh Universitas Indonesia kepada saya.

Jakarta,

Jeanne Françoise



PERNYATAAN ORISINALITAS

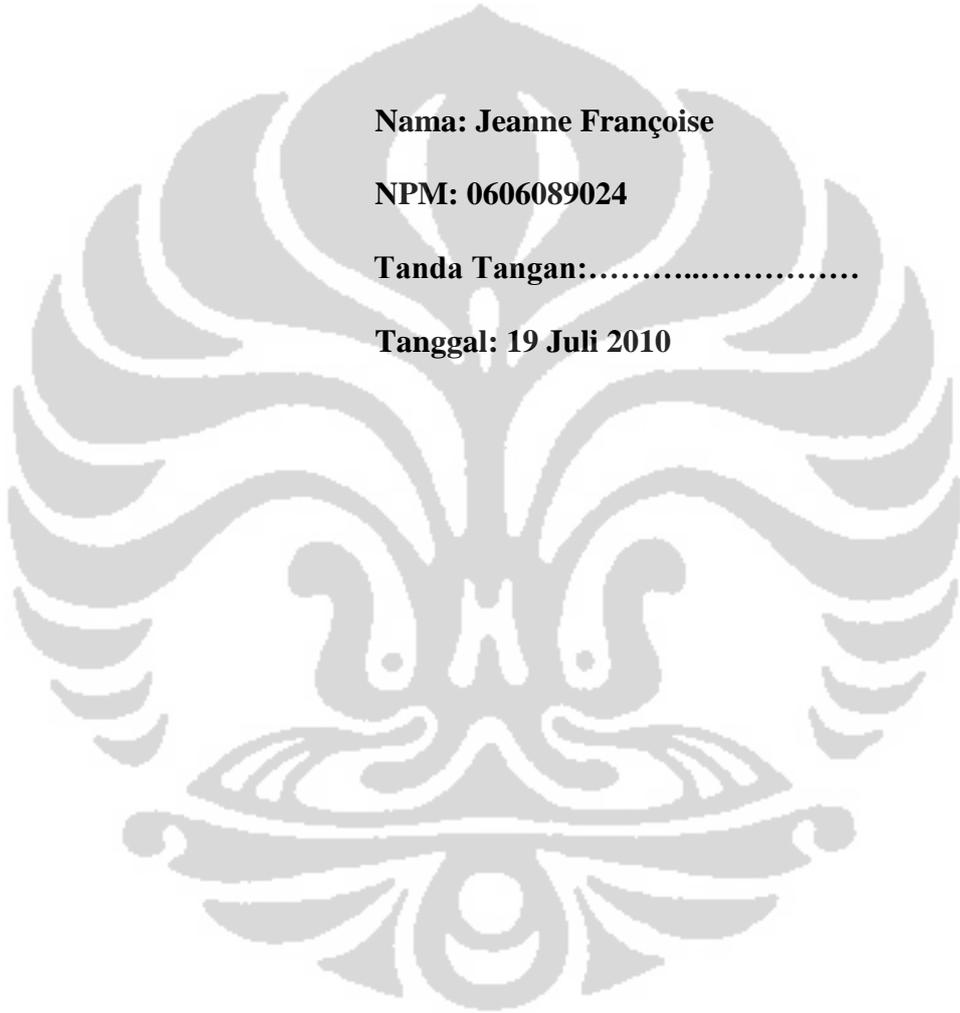
**Skripsi ini adalah hasil karya saya sendiri,
dan semua sumber baik yang dikutip maupun yang dirujuk telah saya
nyatakan dengan benar.**

Nama: Jeanne Françoise

NPM: 0606089024

Tanda Tangan:.....

Tanggal: 19 Juli 2010



HALAMAN PENGESAHAN

Skripsi yang diajukan oleh

Nama : Jeanne Françoise

NPM : 0606089024

Program Studi: Sastra Prancis

Judul : Peran Prancis masa Mitterand sebagai anggota tetap DK PBB:

Studi Kasus Apartheid Afrika Selatan

ini telah berhasil dipertahankan di hadapan Dewan Penguji dan diterima sebagai bagian persyaratan yang diperlukan untuk memperoleh gelar Sarjana Humaniora dari Program Studi Sastra Prancis, Fakultas Ilmu Pengetahuan Budaya, Universitas Indonesia

DEWAN PENGUJI

Pembimbing : Prof. Dr. M. I. Djoko Marihandono (.....)

Penguji 1 : Prof. Dr. Rahayu Surtiati Hidayat (.....)

Penguji 2 : Ari Anggari Harapan, M.Hum (.....)

Ditetapkan di :

Tanggal :

Oleh

Dekan

Fakultas Ilmu Pengetahuan Budaya

Universitas Indonesia

Dr. Bambang Wibawarta, S.s, M.A

NIP. 196510231990031002

UCAPAN TERIMA KASIH

Saya mengucapkan syukur kepada Tuhan yang hidup, Tuhan Yesus Kristus karena atas berkat dan rahmat-Nya, saya dapat menyelesaikan skripsi ini. Penulisan skripsi ini dilakukan dalam rangka memenuhi salah satu syarat untuk mencapai gelar Sarjana Humaniora Program Studi Sastra Prancis pada Fakultas Ilmu Pengetahuan Budaya Universitas Indonesia. Saya menyadari bahwa, tanpa bantuan dan bimbingan dari berbagai pihak, dari masa perkuliahan sampai pada penyusunan skripsi ini, sangatlah sulit bagi saya untuk menyelesaikan skripsi ini. Oleh karena itu, saya mengucapkan terima kasih kepada:

- (1) Bapak Prof. Dr. M. I. Djoko Marihandono, selaku dosen pembimbing yang telah menyediakan waktu, tenaga, dan pikiran untuk mengarahkan saya dalam penyusunan skripsi ini;
- (2) Ibu Prof. Dr. Rahayu Surtiati Hidayat dan Ibu Ari Anggari Harapan, M.Hum, selaku pembaca sekaligus penguji yang selalu merivisi skripsi saya secara sistematis, menyemangati, dan berhasil membuka pemikiran saya;
- (3) Bapak Prof. Dr. Cornelius P. F. Luhulima yang telah memberi saya pancingan pemikiran untuk mencari teori yang melandasi skripsi ini.

Saya menyampaikan terima kasih kepada segenap dosen Sastra Prancis FIB UI yang telah membentuk pemikiran saya menjadi *liberté, égalité, dan fraternité* terutama Bapak Tito Wojowasito dan Ibu Edlina Hafmini Edin, kepada segenap staf FIB UI yang telah membantu saya dalam urusan administrasi selama saya kuliah, dan kepada segenap pegawai Kantor United Nations perwakilan Jakarta yang telah membantu saya mencari data skripsi.

Terima kasih kepada sahabat saya sejak umur dua tahun, Dinda Prawita Erdian, yang selalu memberikan semangat. Saya juga berutang jasa kepada teman-teman Prancis 2006 terutama Lusi Triana, Davina Aussieria, Vitagi Putri Indraningtyas, Nadia Silvarani Lubis, Artha P.P.A, Restika Ayu Prasasty, Rio Saptaniar, Adlina Marshella, Cininta Aryadini, Triyani Wulan Sari, Winaya Simatupang, Nina Evayanti, dan Nur Fathia Rahma Fauzia; teman-teman Prancis

2005 terutama Eka Mochammad Ilham, Sarma Dahita Silalahi, Nurul Izza El Hambra, dan Referika N; dan teman-teman Arab 2006 terutama Subhan Hariadi Putra, Hafidzoh Syir'ati Rahman, dan Aniesah Hassan Syihab. Terima kasih atas diskusi politik dan perdamaian kepada Yolana Wulansuci (Jepang FIB 2006) dan Mutia Hanifa Mulyono (Cina FIB 2006) dan atas diskusi tentang cinta dan kehidupan kepada Ratna Fitria Utami (Ilmu Perpustakaan FIB 2006), Eka Wijayanti (Belanda FIB 2006), dan Fathia Chaerany (Filsafat FIB 2006).

Terima kasih kepada segenap kerabat Kuliah Kerja Nyata UI di Pulau Miangas 2009 terutama Fitria Kurniawati Susilo (Administrasi Fiskal FISIP 2006), Getar Hati (Kesejahteraan Sosial FISIP 2006), Wawan Warsika (Komunikasi FISIP 2006), Narjis Ali (FIK 2006), Siti Tenricapa (Geografi FMIPA 2006), Jenny Maria Doan (FH 2006), Yesmar Banu Kusmagi (Komunikasi FISIP 2006), dan Ghamal Satya Mohammad (Sejarah FIB 2006); segenap angkatan Resimen Mahasiswa UI; segenap anggota Koperasi Mahasiswa FIB UI terutama Rieska Ayu (Ilmu Perpustakaan FIB 2007), Inesya Hartono (Sejarah FIB 2007), Biyanto (Sastra Cina FIB 2007), Ranti Oktaviani (Sastra Jepang FIB 2006), dan Achmad Dedi Faozi (Sejarah FIB 2006); segenap kerabat *International Student Festival in Trondheim 2009* terutama Ratu Ayu Asih Kusuma Putri (Hubungan Internasional FISIP 2005); dan semua orang yang tergabung dalam grup *facebook* "Supports Thesis of Jeanne Francoise: France on Apartheid South Africa".

Akhir kata, saya berharap Tuhan Yesus Kristus berkenan membalas segala kebaikan semua pihak yang telah membantu. Semoga skripsi ini membawa manfaat bagi pengembangan ilmu.

Depok, 19 Juli 2010

Penulis

**HALAMAN PERNYATAAN PERSETUJUAN PUBLIKASI
TUGAS AKHIR UNTUK KEPENTINGAN AKADEMIS**

Sebagai sivitas akademika Universitas Indonesia, saya yang bertanda tangan di bawah ini,

Nama : Jeanne Françoise
NPM : 0606089024
Program Studi : Sastra Prancis
Departemen : Kewilayahan
Fakultas : Ilmu Pengetahuan Budaya
Jenis Karya : Skripsi

demikian pengembangan ilmu pengetahuan, menyetujui untuk memberikan kepada Universitas Indonesia **Hak Bebas Royalti Noneksklusif** (*Non-exclusive Royalty-free Right*) atas karya ilmiah saya yang berjudul:

**PERAN PRANCIS MASA MITTERAND
SEBAGAI ANGGOTA TETAP DEWAN KEAMANAN PERSERIKATAN
BANGSA-BANGSA: STUDI KASUS APARTHEID AFRIKA SELATAN**

beserta perangkat yang ada (jika diperlukan). Dengan **Hak Bebas Royalti Noneksklusif** ini, Universitas Indonesia berhak menyimpan, mengalihmediakan atau memformatkan, mengelola dalam bentuk pangkalan data (*database*), merawat, dan memublikasikan tugas akhir saya selama tetap mencantumkan nama saya sebagai penulis atau pencipta tugas akhir saya ini dan sebagai pemilik **Hak Cipta**.

Demikian pernyataan ini saya buat dengan sebenarnya.

Dibuat di: Depok
Tanggal: 19 Juli 2010
Yang menyatakan

(Jeanne Françoise)

DAFTAR ISI

SURAT PERNYATAAN BEBAS PLAGIARISME	iii
HALAMAN PERNYATAAN ORISINALITAS	iv
HALAMAN PENGESAHAN	v
UCAPAN TERIMA KASIH	vi
HALAMAN PERSETUJUAN PUBLIKASI KARYA ILMIAH	viii
ABSTRAK	ix
ABSTRACT	x
RÉSUMÉ DU MÉMOIRE	xi
DAFTAR ISI	xii
DAFTAR SINGKATAN	xiii
BAB 1 PENDAHULUAN	1
1.1 Latar Belakang	1
1.1.1 Posisi Prancis di PBB	1
1.1.2 Sejarah Singkat Apartheid di Afrika Selatan	4
1.2 Rumusan Permasalahan	7
1.3 Tujuan Penelitian	7
1.4 Sasaran Penelitian	8
1.5 Ruang Lingkup Penelitian	8
1.6 Metodologi Penelitian	8
1.7 Kemaknawian Penelitian	10
1.8 Sistematika Penulisan	11
BAB 2 KERANGKA TEORI	12
2.1 Teori Polemologi	12
2.2 Kerangka Konseptual	14
2.2.1 Konsep konflik	15
2.2.2 Konsep Hak Asasi Manusia (HAM) dalam Konstitusi Prancis 1958 ..	16
2.2.3 Konsep Sosialisme ala Parti Socialiste	18
2.2.4 Konsep Neorealisme	18
BAB 3 ANDIL PRANCIS DALAM AGENDA PBB	19
3.1 Pandangan Umum Prancis tentang Apartheid Afrika Selatan	19
3.2 Peran Prancis dalam Upaya Penghapusan Apartheid Afrika Selatan	22
BAB 4 KEPENTINGAN NASIONAL PRANCIS DI AFRIKA SELATAN..	29
4.1 Investasi Prancis di Afrika Selatan	29
4.2 Peran Penting Afrika Selatan bagi Prancis.....	32
Bab 5 KESIMPULAN	39
DAFTAR REFERENSI	41
Biodata penulis	47
Lampiran 1. Piagam PBB	
Lampiran 2. Prosedur Perlindungan Hak Asasi Manusia di PBB	
Lampiran 3. <i>Droit de L'Homme et du Citoyen</i>	
Lampiran 4. Peta Afrika bagian selatan	
Lampiran 5. 14 Resolusi DK PBB yang disetujui Prancis masa Mitterand	

DAFTAR SINGKATAN



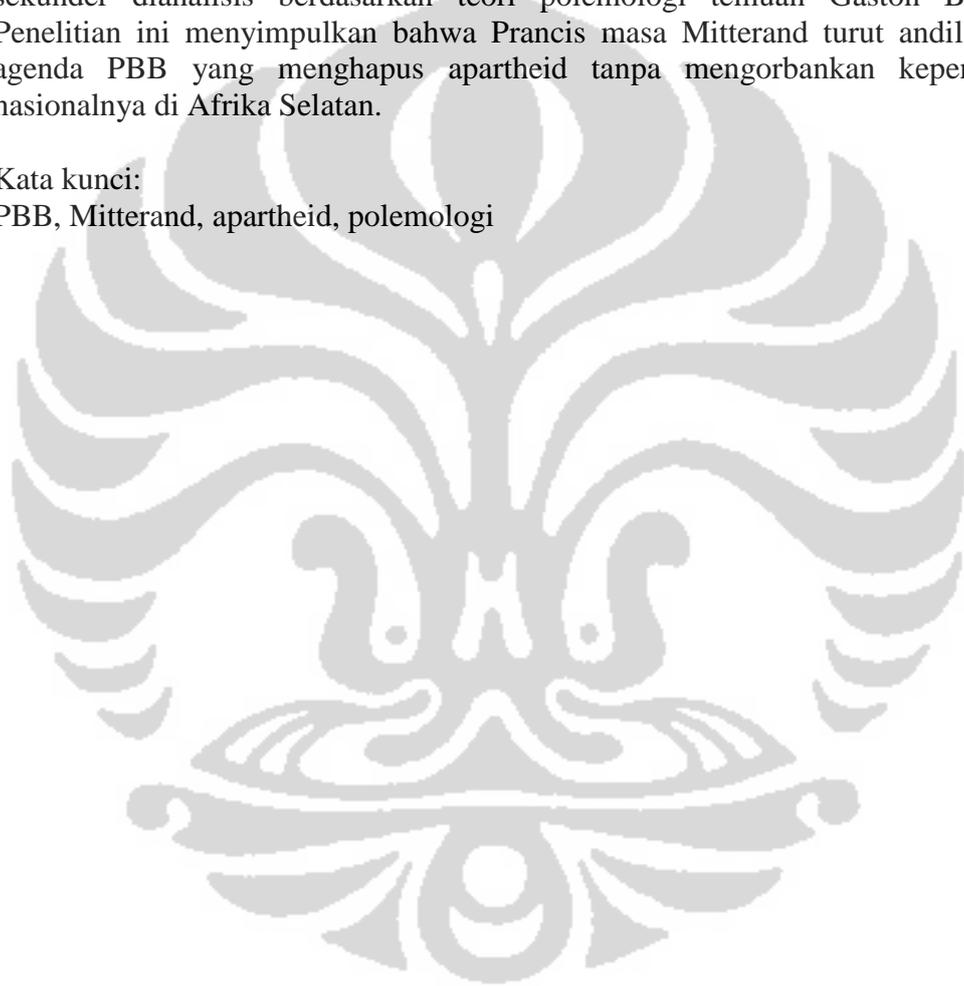
ANC	: African National Congress
CEA	: Commissariat à l'Énergie Atomique
CFDT	: Confédération Française Démocratique du Travail
DAC	: Development Assistant Committee
DK PBB	: Dewan Keamanan Perserikatan Bangsa-bangsa
ESDP	: European Security and Defense Policy
GNP	: Gross National Product
HAM	: Hak Asasi Manusia
IAEA	: International Atomic Energy Agency
ILO	: International Labour Organization
IMF	: International Monetary Fund
KTT	: Konferensi Tingkat Tinggi
LBB	: Liga Bangsa-bangsa
MPLA	: Movimento Popular para la Liberación de Angola
NATO	: North Atlantic Treaty Organization
OAU	: Organization of Africa Unity
OPEC	: Organization of the Petroleum Exporting Countries
P-5	: <i>Permanent Five</i>
Pemilu	: Pemilihan Umum
PBB	: Perserikatan Bangsa-bangsa
PD	: Perang Dunia
PS	: Parti Socialiste
SABC	: South African Broadcasting Corporation
SDA	: Sumber Daya Alam
Sekjen	: Sekretaris Jenderal
SWAPO	: South-West African People Organization
UNCORS	: United Nations Commission of Racist South Africa
UNESCO	: United Nations Educational, Scientific, and Cultural Organization
UNITA	: Unión Nacional para la Independencia Total de Angola
WHO	: World Health Organization

ABSTRAK

Nama : Jeanne Françoise
Program Studi : Sastra Prancis
Judul : Peran Prancis masa Mitterand sebagai anggota tetap Dewan
Keamanan Perserikatan Bangsa-bangsa: Studi Kasus Apartheid Afrika Selatan

Penelitian ini bertujuan untuk menunjukkan peran Prancis pada masa pemerintahan Mitterand sebagai anggota tetap DK PBB dalam menghapus apartheid. Penelitian ini menggunakan metodologi penelitian kualitatif, data sekunder dianalisis berdasarkan teori polemologi temuan Gaston Bouthol. Penelitian ini menyimpulkan bahwa Prancis masa Mitterand turut andil dalam agenda PBB yang menghapus apartheid tanpa mengorbankan kepentingan nasionalnya di Afrika Selatan.

Kata kunci:
PBB, Mitterand, apartheid, polemologi

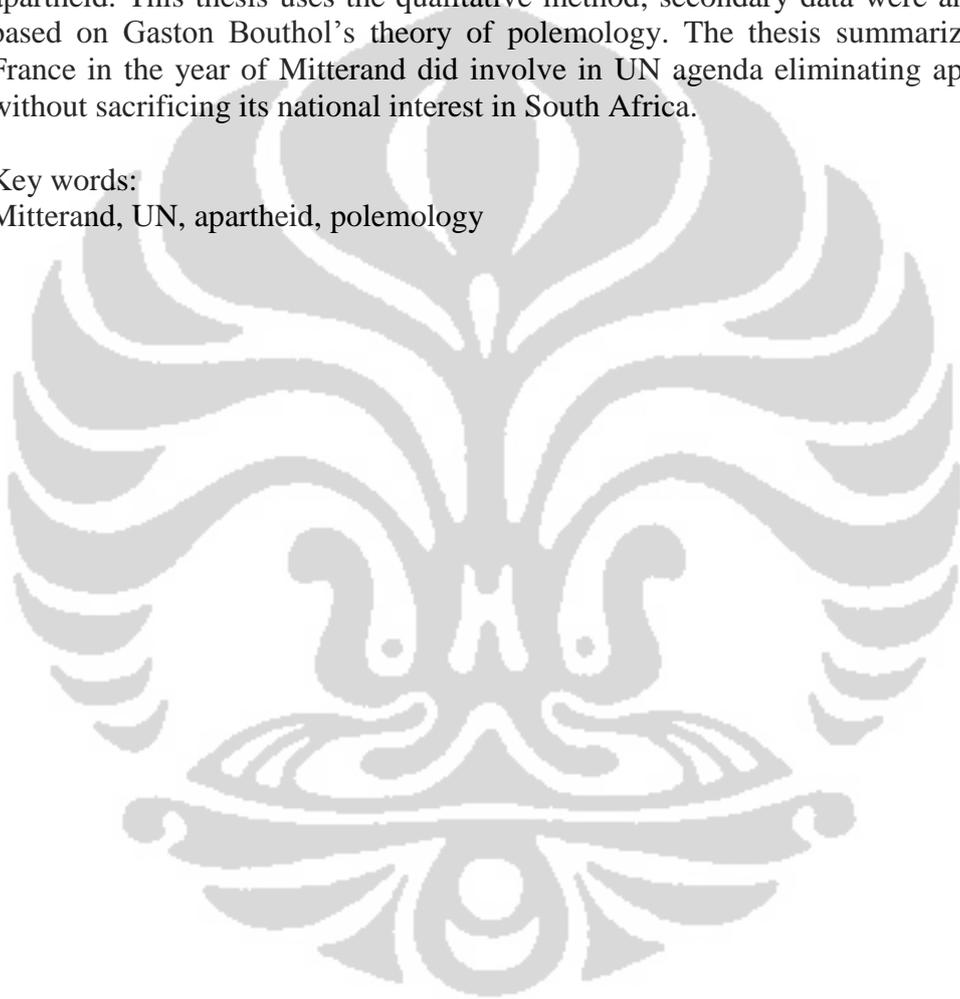


ABSTRACT

Name : Jeanne Françoise
Studies Program : French Studies
Title : The Role of France in the year of Mitterrand as the Permanent Member of United Nations Security Council: The Study Case of Apartheid South Africa

This thesis has a purpose to show which roles that France in the year of Mitterrand, as a permanent member of Security Council of United Nations, did to nullify apartheid. This thesis uses the qualitative method; secondary data were analyzed based on Gaston Bouthol's theory of polemology. The thesis summarizes that France in the year of Mitterrand did involve in UN agenda eliminating apartheid without sacrificing its national interest in South Africa.

Key words:
Mitterrand, UN, apartheid, polemology

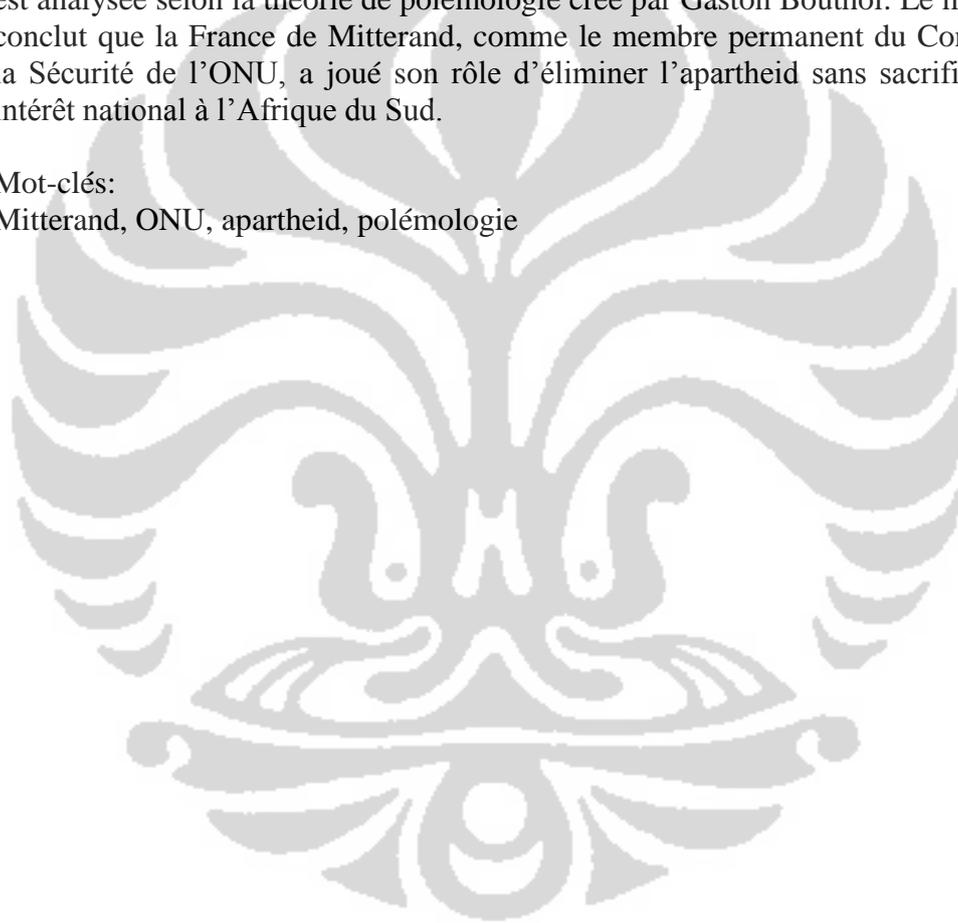


RÉSUMÉ DU MÉMOIRE

Nom : Françoise
Prenom : Jeanne
Section : Française
Titre de la mémoire : Le Rôle de la France de Mitterand dans sa capacité
comme le Membre Permanent du Conseil de la Sécurité de L'Organisation des
Nations-Unies: La Question de L'Apartheid de l'Afrique du Sud

Le mémoire a une destination de montrer le rôle de la France de Mitterand, comme le membre permanent du Conseil de la Sécurité de l'ONU, à supprimer l'apartheid. Le mémoire utilise la méthode scientifique de qualitative; la donnée est analysée selon la théorie de polémologie créée par Gaston Bouthol. Le mémoire conclut que la France de Mitterand, comme le membre permanent du Conseil de la Sécurité de l'ONU, a joué son rôle d'éliminer l'apartheid sans sacrifiant son intérêt national à l'Afrique du Sud.

Mot-clés:
Mitterand, ONU, apartheid, polémologie



“Dilarang berdialog karena ketakutan!”

John Fitzgerald Kennedy (1917--1963)



BAB 1

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Pada masa Mitterand, Prancis berperan besar dalam menghapus apartheid Afrika Selatan. Untuk menjelaskan perannya dalam Dewan Keamanan Perserikatan Bangsa-bangsa, berikut akan dijabarkan terlebih dahulu posisi Prancis di PBB dan sejarah singkat apartheid Afrika Selatan.

1.1.1 Posisi Prancis di PBB

Setelah PD I (1914--1918), Prancis mengalami kekalahan dalam perang sehingga terjadi krisis ekonomi. Untuk mencegah perang lebih lanjut, Prancis melobi 44 negara untuk membentuk suatu organisasi perdamaian internasional yang bertujuan memerangi negara AS [Jerman, Jepang, dan Italia]. Prancis kemudian menjadi pelopor pendirian Liga Bangsa-bangsa (*Société des Nations*) yang memiliki *Covenant* sebagai piagam perdamaannya. *Covenant* dirancang di Konferensi Perdamaian Paris pada 1919 (Suryokusumo 3). Namun, LBB tidaklah berjalan dengan maksimal karena tidak ada sistem dewan yang menjamin perdamaian dan peraturan dalam *Covenant* yang tidak bersifat mengikat anggotanya. Dari 44 negara anggota, terdapat 31 negara (termasuk Prancis) yang kemudian perang kembali.

Prancis belajar dari kesalahan sistem LBB itu. Pasca-PD II tahun 1946, setelah berhasil memenangkan perang dan tampil sebagai negara adikuasa yang mewakili Eropa, Prancis langsung melobi lima puluh negara untuk mengubah LBB menjadi PBB dengan *Charter* (Piagam PBB) sebagai instrumen perdamaannya. Dua tahun kemudian, Prancis turut mendukung pelaksanaan *Declaration of Human Rights*.

Prancis juga hadir dalam Konferensi San Francisco yang mendeklarasikan pembentukan PBB dan setuju menyumbangkan 6 persen dari total pendapatan nasionalnya kepada PBB yang membuatnya berada di urutan keempat penyumbang terbesar setelah Amerika Serikat, Rusia, dan Inggris dan sebelum Cina. Prancis mengusulkan pembentukan “hak suara khusus” bagi lima negara

penyumbang terbesar PBB itu untuk membatasi hak suara mayoritas (negara yang tidak termasuk lima penyumbang terbesar). Hak suara khusus itu nantinya disebut “hak veto” dan negara penyumbang terbesar itu nantinya disebut “negara anggota tetap DK PBB” atau “P-5 DK PBB” (United Nations 309--312).

PBB mempunyai sebuah sistem umum¹ yang terdiri atas enam institusi utama², yaitu Majelis Umum, Mahkamah Internasional, Dewan Keamanan, Dewan Ekonomi dan Sosial, Dewan Perwalian (nantinya menjadi Dewan Kepercayaan), dan Sekretariat³. Khusus untuk urusan hak asasi manusia (HAM)⁴, PBB mempunyai sistem tersendiri yang memberikan kewenangan kepada tiga dari enam institusi utama itu⁵: Majelis Umum, Sekretariat, dan DK PBB yang mempunyai kewenangan paling tinggi. Berdasarkan ketetapan Majelis PBB 1980, DK PBB mempunyai lima negara anggota tetap⁶ dan sepuluh negara anggota tidak tetap⁷. Lima negara anggota tetap bersifat permanen (*Permanent Five* atau P-5) dan sepuluh negara anggota tidak tetap dipilih dua tahun sekali dalam sidang Majelis Umum⁸. P-5 merupakan lima negara (termasuk Prancis) dari 51 anggota pelopor PBB⁹.

¹ Sistem yang disebutkan di sini berlaku sebelum Dewan Perwalian dihapuskan pada dekade 1980.

² Setiap institusi utama membawahkan lembaga khusus. Sebagai contoh, Dewan Ekonomi dan Sosial yang mengatur UNESCO (United Nations Educational, Scientific, and Cultural Organization), FAO (Food and Agriculture Organization), ILO (International Labour Organization), WHO (World Health Organization), dan IMF (International Monetary Fund).

³ Sekretariat dipimpin oleh seorang Sekretaris Jenderal (SekJen).

⁴ Urusan HAM dimasukkan dalam kategori masalah penting di sidang DK PBB.

⁵ Institusi lainnya (Mahkamah Internasional, Dewan Perwalian, dan Dewan Ekonomi dan Sosial) bukan berarti terlewat, tetapi keputusan krusial mengenai HAM ditangani terlebih dahulu oleh tiga institusi utama (Majelis Umum, DK PBB, dan SekJen), baru kemudian berkoordinasi dengan institusi tersebut.

⁶ Lima Anggota Tetap DK PBB disebut juga dengan P-5 (*Permanent Five*). P-5 terdiri dari Amerika Serikat (25,00 %), Federasi Rusia (9,41 %), Prancis (6,00 %), Inggris dan Irlandia (5,02 %), dan Republik Rakyat Cina (0,77 %). Persen menunjukkan skala sumbangan dari Pendapatan Nasional atau GNP (Gross National Product) pada dekade 1980.

⁷ Terjadi amendemen terhadap Piagam PBB pada tanggal 17 Desember 1963 mengenai peningkatan jumlah negara anggota tidak tetap DK PBB, dari lima menjadi sepuluh negara anggota (Santoso 34).

⁸ Berdasarkan Pasal 7 Piagam PBB, pemilihan negara anggota tidak tetap DK PBB adalah dua tahun sekali; lima dari sepuluh negara anggota tidak tetap menjadi DK PBB di setahun pertama dan lima negara sisanya menjadi DK PBB di setahun kedua. Pemilihan anggota tidak tetap DK PBB harus memenuhi kuota keadilan geografis, yaitu lima kursi untuk Asia dan Afrika, satu kursi untuk Eropa Timur, dua kursi untuk Amerika Latin, dan dua kursi untuk Eropa Barat dan negara lain (Barros 26).

⁹ Anggota pelopor berarti menghadiri dan menandatangani Konferensi San Francisco dengan pengecualian Polandia yang tetap merupakan anggota pelopor walaupun berhalangan hadir.

Pasal 24 Piagam PBB memberikan keistimewaan kepada DK PBB dalam hal tanggung jawab utama atas perdamaian dan keamanan internasional dan memberikan kekuasaan tertinggi kepada DK PBB sebagai institusi terakhir yang mengambil keputusan¹⁰. Dalam sidang DK PBB, masalah yang masuk di PBB ada dua macam, yaitu masalah prosedural dan masalah penting¹¹. Pasal 27 Piagam PBB menyatakan bahwa masalah umum dapat diputuskan DK PBB melalui 9 suara persetujuan dari 15 anggotanya¹², sementara masalah penting dapat diputuskan dengan jumlah suara yang sama, tetapi harus termasuk kesepakatan P-5 (kesepakatan itu disebut syarat mutlak)¹³.

Dalam sidang DK PBB untuk pembahasan masalah penting, Presiden DK PBB membawa berkas rekomendasi dari lima institusi utama PBB lain. Rekomendasi yang masuk dalam sidang DK PBB tersebut berupa sebuah resolusi yang dapat diputuskan saat itu juga, atau akan diputuskan dalam sidang DK PBB berikutnya. Ada dua macam resolusi, yaitu resolusi sebagai sebuah mandat dan yang bukan mandat. Resolusi yang menjadi mandat menjadi hukum internasional yang mengikat negara anggota PBB. Sementara itu, resolusi yang bukan mandat substansinya tidak mengikat negara anggota PBB dan hanya dianggap sebagai penyatuan pandangan internasional.

Walaupun tidak diatur dalam Piagam PBB, hanya P-5 yang mempunyai hak veto dan abstain untuk menentukan resolusi sebagai mandat. Sebagai contoh, ketika Prancis mengeluarkan hak veto untuk menolak isi resolusi itu sehingga resolusi bukanlah mandat dan hanya bersifat penyatuan pandangan internasional. Selain itu, Prancis juga dapat abstain jika mendukung resolusi, tetapi ingin menunda penerapan resolusi itu (Djamily, et al. 14). Sebagai contoh, Prancis

¹⁰ Penentuan kriteria masalah yang seharusnya masuk atau tidak masuk ke dalam sistem PBB masih menjadi perdebatan sampai sekarang. Sebagai contoh, Presiden Iran Mahmoud Ahmedinejad menolak pengembangan nuklir negaranya harus membutuhkan persetujuan dari DK PBB. Pasal 34 Piagam PBB hanya menyebutkan wewenang DK PBB untuk melakukan investigasi, bukan intervensi, terhadap kasus-kasus yang dicurigai membahayakan perdamaian dan keamanan internasional.

¹¹ Masalah prosedural adalah masalah umum yang tidak menyangkut kemanusiaan dan HAM. Penentuan suatu masalah sebagai masalah prosedural atau masalah penting harus mendapat persetujuan dari P-5. Inilah yang sering disebut sebagai 'double veto' P-5 (Barros 15).

¹² Dalam mengambil keputusan untuk masalah-masalah prosedural (misalnya penentuan gaji perwakilan PBB) selalu terjadi kesepakatan P-5 tanpa ada yang menggunakan hak veto atau abstain.

¹³ Kesepakatan P-5 berarti tidak ada satupun negara P-5 yang menggunakan hak veto atau abstain.

mengeluarkan hak abstain untuk konflik Suriah-Libanon pada 16 Februari 1946 dan baru menyetujui resolusi kasus itu pada 22 Juli 1958.

1.1.2 Sejarah Singkat Apartheid Afrika Selatan

Afrika Selatan adalah sebuah negara di benua Afrika yang terletak di 23,5° 35° lintang selatan dan 15° 35° bujur timur. Afrika Selatan memiliki Pulau Prince Edward dan Pulau Marion di tengah Samudra Atlantik yang terpisah sejauh 200 kilometer arah tenggara Pretoria dan Pulau Robben yang terletak 7 kilometer dari arah barat pelabuhan Cape Town. Afrika Selatan berbatasan dengan Namibia, Botswana, Zimbabwe, dan Mozambik di sebelah utara, Samudera Atlantik di sebelah selatan, Namibia dan Samudera Atlantik di sebelah barat, Mozambik, Swaziland, dan Samudera Atlantik di sebelah timur, dan Lesotho di bagian tengah. Mayoritas penduduk Afrika Selatan beragama Kristen: Pantekosta¹⁴ (8%), Kristen Karismatik¹⁵ (8%), Katolik¹⁶ (7%), dan Kristen Reformis¹⁷ (7%) (*World Almanac 2009* 817). Tiga kota utama Afrika Selatan adalah Pretoria (ibu kota dan pusat pemerintahan eksekutif), Cape Town (pusat pemerintahan legislatif), dan Johannesburg (pusat pemerintahan yudikatif).

Daerah Afrika Selatan pertama yang ditemukan adalah *Cape de Bonne Éspérance* (Tanjung Harapan) oleh Vasco da Gama pada 1497. Kemudian Afrika Selatan mulai dijajah oleh pendatang dari Eropa. Afrika Selatan pertama kali dijajah oleh para petani Jerman (disebut *Boer* atau *Afrikaner*) sejak abad 17 karena tanahnya yang subur akan emas dan berlian. Kemudian Inggris, Belanda, dan Prancis masuk ke daerah ini dengan tujuan yang sama. Kaum minoritas kulit putih di Afrika Selatan itu yang nantinya menjadi rezim Pretoria adalah keturunan perkawinan campuran penduduk asli Afrika (kulit hitam) dengan penduduk Jerman, Inggris, Belanda, dan Prancis¹⁸.

¹⁴ Aliran Kristen yang menekankan pada penerapan karisma penyembuhan dan pengurapan orang Kristen.

¹⁵ Aliran Kristen yang menekankan pada pengusiran setan.

¹⁶ Aliran Kristen yang mengakui kepemimpinan religius Paus Roma.

¹⁷ Aliran Kristen ajaran Martin Luther King yang tidak mengakui kepemimpinan religius Paus Roma.

¹⁸ Pada 1688, orang Prancis yang pertama kali datang ke Afrika Selatan adalah 200 orang warga negara pengikut *Huguenot* (Aliran Kristen versi Jean Calvin yang tidak mengakui kepemimpinan religius Paus Roma) yang diusir oleh pemerintah berdasarkan aturan agama dalam *Édit de Nantes* (Alleg, et al. 38).

Kata apartheid diambil dari Bahasa Afrika (Afrikaans¹⁹), *apart* dan *hood* yang berarti sistem diskriminasi rasial. Ideologi apartheid Afrika Selatan bermula dari pemikiran kaum kulit putih di Afrika Selatan akan suatu pemerintahan yang terdiri hanya dari kaum kulit putih. Mereka mendapatkan pembenaran dari Injil Perjanjian Baru yang menyebutkan bahwa kultur kepemimpinan Kristen terbaik datang dari penyelamat Yesus Kristus sebagai seorang yang berkulit putih, bukan kulit hitam dan bukan berasal dari penduduk asli Afrika (Alleg, et al. 52). Karena sosoknya yang karismatis dan kepiawaiannya menggunakan berbagai bahasa daerah Afrika Selatan, Paul Krueger, seorang *Boer* putus sekolah, berhasil memengaruhi penduduk asli Afrika Selatan (kaum kulit hitam) yang mayoritas beragama Kristen akan kebenaran mitos itu.

Pada tingkat pemerintahan, Afrika Selatan telah meresmikan apartheid sebagai hukum negara sehingga penerapan di akar rumput sesuai dengan maksud dari rezim Pretoria itu. Setelah ideologi apartheid diresmikan menjadi konstitusi Afrika Selatan tahun 1948, pemimpin Partai Nasionalis Daniel Malan, memberlakukan tiga kebijakan awal apartheid, yakni Undang-undang No.41 (mulai berlaku pada 1950) yang mengatur permukiman berdasarkan warna kulit²⁰, Undang-undang No.55 (mulai berlaku pada 1949) yang menyebutkan pelarangan pernikahan campuran antarwarna kulit²¹, dan Undang-undang No.46 (mulai berlaku pada 1951) yang menegaskan ketiadaan perwakilan kaum kulit hitam dan berwarna di parlemen²².

Apartheid Afrika Selatan termasuk dalam sejarah intervensi PBB yang paling panjang karena telah masuk ke dalam sistem pengambilan keputusan masalah penting PBB sejak sidang perdana Majelis Umum dari 1946 dan

¹⁹ *Afrikaans* adalah salah satu bahasa resmi Afrika Selatan selain *IsiZulu*, *IsiXhosa*, *Sepedi*, Bahasa Inggris, *Setswana*, dan *Sesotho* (*World Almanac 2009* 817).

²⁰ *Group Areas Act* menyebutkan bahwa ada pembagian perumahan bagi kulit putih dan kulit hitam dan berwarna. Namun, jatah pemukiman orang kulit putih merupakan tanah yang subur dan berlimpah SDA, sedangkan pemukiman untuk pribumi dan kulit berwarna bertanah gersang dan jauh dari air bersih.

²¹ *Prevention of Mixed Marriages Act* menyebutkan bahwa perkawinan antara kulit putih dan kulit hitam dilarang dan jika ada yang melanggarnya, maka akan dikenakan denda sesuai ketentuan.

²² *Population Registration Act* menyebutkan bahwa tidak boleh ada perwakilan pribumi dan kulit berwarna dalam pemerintahan. Walaupun diperlukan, mereka harus di bawah kedudukan kaum kulit putih. Pada Konstitusi Baru 1983 terdapat aturan yang membolehkan adanya perwakilan kulit hitam dan berwarna di parlemen. Namun, apartheid masih tetap berlaku karena sistem pemisahan fasilitas wakil-wakil itu, misalnya pelayanan kesehatan dan pendidikan.

berlangsung sampai 1994. Setelah mempertimbangkan pernyataan dari perwakilan India mengenai 200.000 warga negara India yang tidak mendapat izin untuk bermukim di Afrika Selatan, sidang Majelis Umum perdana menyatakan bahwa apartheid Afrika Selatan adalah sebuah “crime against humanity” dan meminta DK PBB untuk segera menghapus apartheid itu (*The United Nations and Apartheid* 175--190).

Apartheid Afrika Selatan, yang menjadi isu utama di Afrika sejak dekade 1940, berawal dari pembagian kekuasaan (Maguire 138) sebagai berikut. Pada abad ke-19, Kerajaan Jerman menguasai sebagian besar perdagangan Eropa. Pada 1884, dalam sebuah konferensi yang diadakan di Berlin, Kanselir sekaligus pangeran Jerman, Otto von Bismarck, membagi wilayah jajahan di Afrika untuk dibagikan kepada negara-negara Eropa. Kebijakan bersejarah itu membuat Jerman mendapat wilayah selatan (sekarang Afrika Selatan dan daerah sekitarnya) dan Inggris mendapat wilayah utara dan tengah (sekarang Kenya dan daerah sekitarnya). Hal itu disebut sebagai awal imperialisme di Afrika (Bharwadaj 19) ketika apartheid mulai diperkenalkan.

Setelah hampir empat dekade berkuasa dengan hukum apartheid, pemerintah kulit putih Afrika Selatan mulai menyadari bahwa perekonomian Afrika Selatan melemah setelah penerapan isolasi ekonomi dan embargo senjata DK PBB oleh negara anggota PBB (terutama Asia dan Afrika). Apartheid tidak lagi meneror kaum kulit hitam, tetapi kaum kulit putih. Bom yang dibuat oleh organisasi pergerakan tidak hanya ditujukan bagi pemerintah sipil, tetapi juga bagi keluarga mereka. Persenjataan dari luar negeri yang dikirim untuk polisi dan tentara Afrika Selatan juga dibom, dicuri, dan dirusak. Pada 1982, Presiden P.W. Botha menawarkan ide pemberian kekuasaan kepada orang kulit hitam dan berwarna dalam sidang parlemen, tetapi ditolak oleh para anggota parlemen. P.W. Botha kemudian mengundurkan diri dan digantikan oleh Frederik Willem de Klerk yang anti-apartheid. F. W de Klerk kemudian mendeklarasikan penghapusan apartheid tahun 1994 dan memberikan kekuasaan kepada organisasi pergerakan antiapartheid agar mempunyai perwakilan di parlemen. Pada Pemilu 1994, ANC menang, Nelson Mandela dilantik sebagai presiden pada 27 April 1994, dan bendera baru enam warna dikibarkan sebagai tanda bahwa Afrika

Selatan adalah negara multirasial. Sebuah hukum pasca-apartheid disahkan pada 10 Desember 1996, bertepatan dengan Hari Hak Asasi Manusia Sedunia.

Dalam kapasitasnya sebagai anggota tetap DK PBB, Prancis menghadapi berbagai permasalahan internasional, salah satunya adalah apartheid Afrika Selatan. Konflik berbasis apartheid Afrika Selatan adalah kasus PBB yang paling banyak diintervensi oleh Prancis dalam sejarahnya sebagai anggota tetap DK PBB. Dari 31 resolusi DK PBB untuk Afrika Selatan, Prancis menggunakan hak vetonya sebanyak empat kali dan tidak pernah menggunakan hak abstainnya (“Subjects of UN Security Council Vetoes.”).

Di Sidang Majelis Umum I tahun 1946, Prancis menyetujui resolusi PBB pertama dan mengirim peninjau (*observer*) ke Afrika Selatan. Pada 1953, Prancis adalah salah satu negara yang mengusulkan pembentukan United Nations Commission of Racist South Africa (UNCORS) dan mengutus Monsieur Henri Laugier untuk menempati jabatan wakil ketua UNCORS²³. Sembilan tahun kemudian, Prancis dan negara-negara Barat mengusulkan pembentukan Special Committee against Apartheid²⁴.

Ketika François Mitterand menjadi presiden sosialis pertama Prancis, Ketua Special Committee Against Apartheid PBB, Mr. Akporode Clark dari Nigeria meminta penerapan janji Mitterand tentang penghapusan apartheid Afrika Selatan yang diusung dalam kampanye Parti Socialiste (PS). Saat itu, tidak ada satu pun negara anggota tetap DK PBB yang mempunyai rumusan kebijakan luar negeri antiapartheid seperti itu.

1.2 Rumusan Permasalahan

Apa peran Prancis pada masa pemerintahan Presiden François Mitterand sebagai anggota tetap DK PBB dalam penghapusan apartheid Afrika Selatan?

²³ UNCORS bertugas memfasilitasi para peninjau PBB di Afrika Selatan dan mengirimkan laporan penelitian lapangan apartheid Afrika Selatan dari para peninjau itu kepada Sekjen PBB.

²⁴ Special Committee against Apartheid bertugas membantu Sekjen dalam segala kegiatan yang berhubungan dengan penghapusan apartheid, misalnya konferensi internasional antiapartheid.

1.3 Tujuan Penelitian

Tujuan penelitian adalah menunjukkan efek bagi Prancis dan Afrika Selatan setelah apartheid Afrika Selatan dihapuskan.

1.4 Sasaran Penelitian

Tujuan penelitian dapat dicapai melalui empat sasaran:

1. Menunjukkan pandangan umum Prancis terhadap apartheid Afrika Selatan.
2. Menunjukkan peran Prancis dalam upaya penghapusan apartheid Afrika Selatan.
3. Menunjukkan investasi Prancis di Afrika Selatan.
4. Menunjukkan peran penting Afrika Selatan bagi Prancis.

1.5 Ruang Lingkup Penelitian

Penelitian mencakup tiga aspek. Dari aspek temporal, penelitian ini berfokus pada Prancis pada masa pemerintahan Presiden François Mitterand (1981--1995). Penelitian dimulai pada 1981 karena tahun tersebut adalah tahun awal pemerintahan Presiden Mitterand dan diakhiri pada 1995 karena pada tahun itu masa jabatan Mitterand sebagai presiden digantikan oleh Jacques Chirac.

Kedua adalah aspek spasial, yaitu Prancis dan Afrika Selatan. Prancis masa Mitterand menjalin kerja sama dengan pemerintah Afrika Selatan. Namun, Prancis tampil sebagai satu-satunya negara anggota tetap DK PBB yang berpotensi menghapus apartheid.

Ketiga adalah aspek tematis, yaitu Prancis sebagai salah satu anggota tetap DK PBB (P-5 DK PBB) yang menjamin hak veto dan abstain dalam menghadapi apartheid Afrika Selatan. Pada masa Mitterand, Prancis menyetujui sembilan belas Resolusi DK PBB untuk apartheid Afrika Selatan tanpa menggunakan hak veto ataupun abstain.

1.6 Metodologi Penelitian

Teori yang digunakan dalam penelitian ini adalah polemologi, temuan seorang sosiolog Prancis, Gaston Bouthol, yang diparafrasa dalam Polemologi:

Peranti Kuantitatif dan Kualitatif Trilogi Perdamaian oleh Drs. Loekito Santoso (1991) dan Polemologi: Bacaan Perang dan Damai oleh Prof. Dr. T. Jacob (1992).

Metode penelitian mengikuti tahapan dalam metode penelitian yang ditawarkan oleh Kuntowijoyo (89--105) yang terdiri dari pemilihan topik, pengumpulan sumber, kritik atau verifikasi sumber, interpretasi, dan historiografi.

Pemilihan topik penelitian adalah peran Prancis masa Mitterand sebagai anggota tetap DK PBB dalam kasus apartheid Afrika Selatan. Prancis masa Mitterand dipilih di antara pemerintahan Republik V lain karena Prancis masa Mitterand diakui PBB sebagai satu-satunya negara anggota tetap DK PBB yang berperan besar dalam penghapusan apartheid (*The United Nations and Apartheid* 35).

Sumber data terkait dengan pengetahuan umum mengenai PBB diambil dari dua buku: Pengetahuan Dasar mengenai Perserikatan Bangsa-bangsa dan PBB: Dulu, Kini, dan Esok karya James Barros (1990), dan situs internet <http://www.un.org/>. Data mengenai sejarah dan dinamika apartheid diambil dari tiga buku: Perjalanan Panjang menuju Kebebasan: Otobiografi Nelson Mandela, The United Nations and Apartheid 1948-1994 (1995), dan Politics in South Africa From Vorster to De Klerk karya Keith Maguire (1991), berita dari *The Jakarta Post* dan *New York Times*, sembilan situs internet: <http://www.unesco.org/>, <http://www.nelsonmandela.org/>, <http://www.africafiles.org/>, <http://www.sahistory.org.za/>, <http://www.info.gov.za/>, <http://www.countrystudies.us/>, <http://www.dlib.eastview.com/>, <http://www.articles.latimes.com/>, dan <http://www.economicexpert.com/>. Data mengenai Parti Socialiste pimpinan Mitterand diambil dari artikel “Consensus of Silence: The French Socialist Party and Defence Policy under Francois Mitterrand” karya Jolyon Howorth (1984). Data mengenai 19 Resolusi DK PBB untuk Afrika Selatan yang dihadapi Prancis masa Mitterand diambil dari <http://www.daghammarsjoldlibrary.org/> dan <http://www.globalpolicy.org/>. Data mengenai politik luar negeri Mitterand di PBB diambil dari artikel “La Continuité malgré la volonté de rupture: les présidences de François Mitterrand (1981-1995)” dalam buku Histoire de la Diplomatie Française karya Jean-Claude Allain, et al. (2005). Data mengenai politik luar negeri Mitterand di Afrika diambil dari buku François Mitterrand: A Study in Political Leadership karya Alistair Cole (1994),

empat artikel “Mitterrand's Foreign Policy: The Limits of Continuity” karya Dominique Moïsi (1981), “President Mitterrand and Africa” karya Kaye Whiteman (1983), “The Historical, Economic, and Political Bases of France's African Policy” karya Guy Martin (1985), “French African Policy: Towards Change” karya Tony Chafer (1992), berita dari *Le Monde*, *Sun Journal*, dan *Time*. Data mengenai kepentingan nasional Prancis masa Mitterrand di Afrika Selatan diambil dari artikel “Namibia and Government of France” karya Jacques Marchand (1983), *Reprocessing Spent Nuclear Fuel: The French Connection* karya David Dickson (1983), situs internet <http://www.goldsilver.com/>, dan berita dari *Independent*.

Tahap verifikasi terdiri dari dua tahap, yakni otentisitas (kritik intern) dan kredibilitas (kritik ekstern). Tahap verifikasi diabaikan dalam penelitian ini karena data yang dikumpulkan dari buku, artikel, koran, liputan berita, dan situs internet berasal dari penulis dan lembaga yang dipercaya sehingga dapat langsung dipakai tanpa dicek secara kimiawi, maupun dicek menggunakan teknologi mutakhir. Penelitian ini juga mengabaikan tahap historiografi karena tema yang diangkat condong ke arah politik.

Tahap interpretasi terdiri dari dua, yakni analisis dan sintesis. Analisis, berarti penguraian data, sedangkan sintesis berarti penyatuan data yang ada. Hasilnya adalah temuan fakta sebagai jawaban dari pertanyaan penelitian.

1.7 Kemaknawian Penelitian

Penelitian ini mempunyai fungsi akademis dan praktis. Secara akademis, penelitian ini dapat menjadi bahan referensi bagi penelitian S1, S2, maupun S3 mengenai Prancis yang terkait dengan politik luar negerinya, baik di Afrika Selatan, maupun di PBB sekaligus mengembangkan teori polemologi yang belum berkembang di Indonesia untuk menambah Wawasan Nusantara bahwa bangsa Indonesia mampu turut serta dalam mencari solusi konflik internasional karena termasuk negara anggota PBB.

Secara praktis, penelitian ini dapat menjadi bahan pembandingan antara politik luar negeri Prancis dan politik luar negeri Indonesia dalam kaitannya

dengan peran kedua negara itu di PBB dalam upaya penyelesaian sebuah konflik internasional.

1.8 Sistematika Penulisan

Penelitian ini berlatar belakang bahwa Prancis sudah sejak lama berupaya menghapus apartheid, namun keseriusan baru muncul pada masa pemerintahan Mitterand ketika Parti Socialiste mengusung agenda antiapartheid. Berikut ini paparan dalam bab selanjutnya.

Bab 2 berisi Kerangka Teori, yaitu polemologi dan konsep-konsep untuk membedah sejauh mana Prancis masa Mitterand menghapus apartheid dalam agenda PBB. Bab 3 berisi pandangan umum Prancis terhadap apartheid yang terkait dengan konsep dalam Bab 2 dan peran apa saja yang dilakukan Prancis untuk menghapus apartheid itu. Bab 4 berisi investasi Prancis di Afrika Selatan dan peran Afrika Selatan bagi Prancis yang menjadi alasan utama Prancis menentang rezim Pretoria. Bab 5 berisi Kesimpulan yang merangkum efek bagi Prancis dan Afrika Selatan setelah Prancis menghapus apartheid.

BAB 2

KERANGKA TEORI

Bab ini memfokuskan pada teori dan konsep yang akan digunakan untuk membedah peran Prancis masa Mitterand dalam kasus apartheid Afrika Selatan di Bab 3. Berikut akan diuraikan teori polemologi yang terkait dengan penjabaran DK PBB di bab terdahulu, kemudian disusul dengan konsep yang terkait dengan pandangan Prancis masa Mitterand tentang apartheid Afrika Selatan.

2.1 Teori Polemologi

Studi tentang PBB (*UN Studies*) berbeda dengan teori polemologi. Walaupun polemologi menekankan kepada peran PBB, studi polemologi mengkaji proses perdamaian dan tidak mengkaji sejarah dan konten PBB seperti *UN Studies*. Dapat dilihat juga bahwa tidak ada lembaga pembelajaran untuk *UN Studies*, tetapi ada tentang studi polemologi, misalnya *Institut Polémologie Française* di Paris dan Strasbourg, Prancis.

Kata polemologi berasal dari Bahasa Yunani, *polemos* berarti polemik dan *logos* berarti ilmu. Polemologi adalah ilmu pengetahuan cabang dari ilmu pengetahuan sosial yang mempelajari asal muasal konflik atau perang (*cause of war*) dan proses perdamaian dengan cara memasukkan konflik itu ke dalam sistem DK PBB. Teori polemologi ditemukan oleh seorang sosiolog Prancis, Gaston Bouthol (1896--1980) tahun 1942.

Polemologi mempelajari proses perdamaian sebuah konflik di dalam suprastruktur PBB. Suprastruktur PBB itu adalah DK PBB yang membawahkan substruktur, yaitu institusi lain PBB, misalnya Majelis Umum dan Sekjen PBB.

Dalam proses perdamaian itu, setiap konflik melewati tahap kuantitatif yang dilakukan oleh DK PBB untuk mendapatkan resolusi perdamaian yang menjadi mandat dan kemudian masuk dalam tahap kualitatif yang dilakukan oleh DK PBB dan institusi PBB lain berupa penerapan resolusi yang telah menjadi mandat itu. Dalam polemologi, setiap tindakan negara anggota PBB yang bertujuan menyelesaikan konflik dianggap termasuk dalam kegiatan agenda PBB.

Polemologi menekankan bahwa lima anggota tetap DK PBB adalah satu-satunya institusi perdamaian yang paling berpotensi untuk menerapkan resolusi perdamaian di daerah yang berkonflik dibandingkan institusi PBB lain karena dalam tahap kuantitatif hanya lima negara itu yang mempunyai wewenang untuk mengeluarkan hak veto dan abstain.

Tahap kuantitatif adalah hitungan jumlah veto dan abstain di sidang DK PBB terkait dengan sikap P-5 DK PBB untuk menentukan resolusi sebagai mandat. Dari hasil itu didapatkan indikasi keberhasilan proses perdamaian; yaitu pesimis, netral, dan optimis.

Rumus tahapan kuantitatif adalah 6-6-4-6-6 (Santoso 35), namun untuk memudahkan pemahaman, rumus itu dapat dituliskan:

$$15-X=Y$$

15 adalah jumlah negara-negara anggota DK PBB.

X adalah jumlah negara-negara anggota DK PBB yang menyetujui resolusi menjadi sebuah mandat.

Y adalah konstituante (hasil) dari *voting* di sidang DK PBB.

Y mempunyai patokan angka 6 sebagai hasil dari hitungan pemenuhan syarat mutlak, yaitu penyetujuan minimal 9 negara (termasuk P-5) dari 15 negara-negara anggota DK PBB, atau

$$15-9=6$$

Jika konstituante *voting* didapatkan, maka terciptalah hitungan peramalan yang dirumuskan sebagai berikut.

Jika $Y < 6$ maka proses perdamaian bersifat optimis.

Jika $Y=6$ maka proses perdamaian berpotensi menjadi optimis dan pesimis.

Jika $Y > 6$ maka proses perdamaian bersifat pesimis.

Tahap kualitatif merupakan penerapan resolusi yang terdiri dari penciptaan akan kondisi dan situasi perdamaian (*peace-making*), penjagaan akan kondisi dan situasi perdamaian (*peace-keeping*), dan pembangunan dalam kondisi dan situasi yang telah damai (*peace-building*). Boutros-Ghali (11) menambahkan diplomasi pencegahan (*preventive diplomacy*) sebelum *peace-making*.

Preventive diplomacy difokuskan pada kegiatan pengumpulan data PBB di daerah konflik. Bentuk dari peran *preventive diplomacy* itu terdiri dari pengiriman

peninjau (*observer*) ke daerah yang berkonflik dan kunjungan kenegaraan antara pihak-pihak yang berkonflik ke negara-negara anggota PBB dan sebaliknya. *Peace-making* difokuskan pada tindakan PBB untuk memungkinkan adanya perundingan antarpihak yang berkonflik. Bentuk dari peran *peace-making* itu antara lain pengeluaran resolusi embargo dan pengadaan konferensi internasional. *Peace-keeping* difokuskan pada kegiatan perdamaian setelah konflik berhasil dilenyapkan. Bentuk *peace-keeping* itu terdiri atas pengiriman pasukan perdamaian dan pembentukan unit-unit perdamaian untuk menjaga situasi daerah bekas konflik agar tetap damai. *Peace-building* difokuskan pada kegiatan perdamaian untuk melepas daerah konflik akan kebergantungan pada PBB. Bentuk *peace-building* antara lain pengecekan senjata, peningkatan transportasi, pemanfaatan sumber air dan listrik, dan pengadaan Pemilihan Umum (*Pengetahuan Dasar mengenai Perserikatan Bangsa-bangsa* 38). Untuk apartheid Afrika Selatan, PBB membagi tahapan kualitatif berdasarkan tahun. Dari 1948 sampai 1990 adalah *peace-making*, pada 1990--1994 adalah *peace-keeping*, dan masa pemilu 1994 adalah *peace-building*. Sementara itu, *preventive diplomacy* mewarnai keseluruhan penghapusan apartheid.

Polemologi menekankan bahwa tindakan negara anggota DK PBB untuk mendukung agenda PBB berdasarkan Piagam PBB. Piagam PBB adalah hukum internasional yang mengikat negara-negara anggota PBB. Piagam PBB terdiri dari 13 Pasal dan 111 Ayat yang memuat konsep konflik dan perdamaian antarbangsa dan pengaturan umum keenam institusi utama PBB (Majelis Umum, Dewan Keamanan, Sekretariat, Dewan Kepercayaan, Dewan Ekonomi dan Sosial, dan Mahkamah Internasional). Posisi DK PBB diatur dalam Pasal 5 Piagam PBB yang terdiri dari 10 ayat (P-5 DK PBB disebutkan dalam ayat 23) dan kapasitasnya diatur dalam Pasal 7 Piagam PBB. Sanksi dan embargo DK PBB diatur dalam Pasal 6 dan Pasal 7 atau disebut juga Pasal 6 ½. Piagam PBB mempunyai *status quo ante bellum* yang berarti Piagam PBB berlaku secara internasional dan harus diterapkan oleh semua negara di dunia apa pun bentuk negaranya (Wallenstein 97). Bagi negara yang berkonflik, *status quo ante bellum* itu harus menjadi hukum dominan dengan cara mengabaikan hukum nasional. Sebagai contoh, Afrika

Selatan tahun 1989 mulai mengabaikan hukum nasional (hukum apartheid) dan menghormati Piagam PBB.

Piagam PBB menyebutkan bahwa fungsi DK PBB adalah menyelidiki pertikaian apa saja atau keadaan yang dianggap dapat menyebabkan pertentangan internasional, memberikan rekomendasi mengenai metode penyelesaian pertikaian, melaksanakan fungsi perwalian untuk daerah yang tidak berpemerintahan sendiri, menjaga perdamaian dan keamanan internasional sesuai dengan prinsip dan tujuan PBB, memformulasikan rencana pembentukan satu sistem untuk mengatur persenjataan, menentukan adanya ancaman terhadap perdamaian atau tindakan agresi dan merekomendasikan tindakan yang harus diambil, menyerukan kepada negara anggota untuk melaksanakan sanksi ekonomi dan tindakan lain tanpa menggunakan kekerasan untuk mencegah atau menghentikan agresi, mengambil tindakan militer terhadap agresor (United Nations 14-15).

Terdapat empat macam semangat perdamaian polemologis, yakni pasifisme agama atau semangat perdamaian berdasarkan ajaran agama, pasifisme ekonomi atau semangat perdamaian berlandaskan kerja sama ekonomi, pasifisme sosialis atau semangat perdamaian berlandaskan gencatan senjata, dan pasifisme emosional atau semangat perdamaian berlandaskan kengerian konflik yang telah terjadi sebelumnya (Jacob 19).

2.2 Kerangka Konseptual

Setelah penjabaran teori polemologi, berikut akan dijelaskan konsep konflik, HAM dalam Konstitusi Prancis 1958, sosialisme ala Parti Socialiste, dan neorealisme.

2.1.1 Konsep Konflik

Jacob (20) menyebutkan nama lain polemologi adalah irenologi. Polemologi bersifat multidisipliner atau bisa dipelajari dari berbagai pendekatan ilmu: politik, sosiologi, hukum, psikologi, budaya, sejarah, kedokteran, ekonomi, biologi, dan ilmu-ilmu lain. Untuk memahami teori polemologi diperlukan pengetahuan tentang konsep konflik.

Kata konflik berasal dari Bahasa Latin *conflictus* yang berarti ‘pertentangan sebagai perwujudan dan atau pelaksanaan beraneka pertentangan antara dua pihak yang dapat merupakan dua orang bahkan golongan besar seperti negara’. Menurut Maswadi Rauf (2000), konflik adalah gejala sosial yang ada dalam setiap masyarakat di mana konflik itu selalu ada selama masyarakat itu ada sehingga tidaklah mungkin menghapus konflik; sebaliknya tidaklah mungkin konsensus dipertahankan terus-menerus sekalipun dengan cara-cara kekerasan yang juga merupakan keinginan para penguasa otoriter. Sementara itu, Chris Mitchell (1981) mengatakan konflik juga menunjukkan hubungan antara dua pihak atau lebih (individu atau kelompok) yang memiliki sasaran yang tidak sejalan. Definisi ini menunjukkan perbedaan yang jelas antara konflik dan kekerasan. Kekerasan meliputi tindakan, perkataan, sikap, berbagai struktur atau sistem yang menyebabkan kerusakan secara fisik, mental, sosial, atau ekologi, dan atau menghalangi seseorang untuk meraih potensinya secara penuh. Konflik mempunyai dampak yang sangat besar pada masyarakat karena, jika berlangsung terus-menerus, akan menjurus ke arah disintegrasi sosial. Oleh karena itu, salah satu persoalan utama antara masyarakat dan negara adalah masalah konflik yaitu usaha untuk mencari titik temu antara pihak yang berkonflik sehingga konsensus atau kesepakatan dapat tercapai. Dengan demikian, dapat dilihat bahwa konflik adalah pertentangan atau perbedaan antara dua orang atau lebih (kelompok) yang didasarkan pada perbedaan (“Konflik dalam pendekatan teoritis.”).

2.2.2 Konsep Hak Asasi Manusia (HAM) dalam Konstitusi Prancis 1958

Konstitusi Prancis 1958 merupakan hukum nasional negara Prancis, hasil referendum (yang disetujui) tahun 1958 di Prancis untuk memperkuat kekuasaan presiden dan para menteri dengan bertanggungjawab terhadap parlemen¹. Konstitusi ini berisi pengakuan terhadap Hak Asasi Manusia dan Warga Negara karena preambulnya disebutkan bahwa Prancis harus mengikuti prinsip dari *Déclaration des Droits de L’homme et du Citoyen*.

Konstitusi Prancis 1958 menghargai kebebasan manusia berdasarkan hukum. Dalam Konstitusi itu terdapat pengakuan HAM yang dirumuskan dalam

¹ Parlemen di Prancis disebut dengan *Assemblée Nationale* yang setingkat dengan Dewan Perwakilan Rakyat di Indonesia.

*Déclaration des Droits de L'homme et du Citoyen*² yang berisi persamaan hak seluruh warga negara di hadapan hukum, hak praduga tak bersalah, kebebasan berpendapat, kebebasan beragama, dan penolakan terhadap hak istimewa kelas atas (Hauriou 176).

Konstitusi 1958 juga mengatur bahwa pengambilan kebijakan hubungan luar negeri, pertahanan, dan keamanan nasional diputuskan langsung oleh presiden Prancis. Sebagai contoh, semua kebijakan yang diputuskan di Kantor Urusan Afrika harus disetujui dan dipertanggungjawabkan kepada presiden.

2.2.3 Konsep sosialisme à la Parti Socialiste

PS adalah sebuah partai kiri Prancis yang mempunyai ide sosialisme, yaitu kemakmuran ekonomi bagi semua warga negara (*Ensiklopedia Umum* 1991). Ide sosialisme itu didengungkan melalui sebutan 'la grandeur de la France' oleh Mitterand (Cole 179).

Pada masa Mitterand, PS mendeklarasikan diri menolak paham komunisme (Cole 23,29), menghentikan program nuklir, dan mengusung sebuah agenda kebijakan politik luar negeri yang menekankan pada keberpihakan Prancis pada demokrasi dan pembelaan HAM. Urutan pertama agenda itu adalah kasus apartheid Afrika Selatan (Whiteman 331).

2.2.4 Konsep Neorealisme

Neorealisme adalah salah satu konsep dalam teori hubungan internasional yang menyatakan bahwa intervensi sebuah negara terhadap konflik dalam negeri negara lain bertujuan untuk mempertahankan kepentingan nasionalnya di negara yang berkonflik itu. Dalam konsep neorealisme, intervensi negara itu dapat dilakukan melalui berbagai macam cara: bukan hanya melalui okupasi militer (Konsep Realisme), tetapi juga melalui pemanfaatan posisinya di organisasi internasional seperti PBB (Olsen 347).

Neorealisme mengklaim bahwa untuk mempertahankan kepentingan nasionalnya itu, sebuah negara pada awalnya mengaku membela konflik dalam

² Tercantum dalam preambuli Konstitusi 1958.

negeri negara lain berdasarkan demokrasi dan HAM yang tercantum dalam instrumennya (hukum nasionalnya).

Demikian kerangka teori untuk menganalisis bahwa Prancis berpotensi besar untuk turut serta menghapus apartheid Afrika Selatan. Menurut teori polemologi, Prancis adalah suprastruktur PBB yang mampu menjamin proses perdamaian di Afrika Selatan dalam tahapan kuantitatif dan kualitatif sehingga Prancis dapat bertindak menghapus apartheid berdasarkan Piagam PBB. Konstitusi Prancis 1958 menjadi dasar tindakan Prancis dalam kasus apartheid Afrika Selatan selama 13 tahun kepresidenan Mitterand itu. Instrumen lain adalah PS.

Dalam bab berikut akan dijelaskan sejauh mana Prancis berperan dalam penghapusan apartheid dalam kapasitasnya sebagai anggota tetap DK PBB itu. Namun, terlebih dahulu akan ditunjukkan bagaimana Prancis memandang apartheid sesuai dengan konsep HAM dalam Konstitusi 1958 dan konsep sosialisme ala Parti Socialiste.

BAB 3

ANDIL PRANCIS DALAM AGENDA PBB

Setelah latar belakang berisi posisi Prancis di PBB dan penjabaran teori, maka di sini diuraikan pandangan umum Prancis terhadap apartheid dan apa saja peran Prancis dalam upaya penghapusan apartheid Afrika Selatan.

3.1 Pandangan umum Prancis terhadap apartheid Afrika Selatan

Sumber konflik dalam negeri Afrika Selatan adalah adanya sistem apartheid. Dua pihak yang berkonflik adalah pemerintah kulit putih (sering disebut dengan rezim Pretoria) yang menerapkan apartheid dan penduduk Afrika Selatan yang menolak apartheid. Penduduk Afrika Selatan ini biasa disebut sebagai kaum nonkulit putih (walaupun banyak pula orang kulit putih yang menentang apartheid). Sistem apartheid itu menyebabkan kerusakan secara fisik, mental, sosial atau lingkungan, dan atau menghalangi kaum non-kulit putih untuk meraih potensinya secara demokratis. Dampak konflik di Afrika Selatan itu terlihat ketika pada awal 1980, kaum nonkulit putih meneror pemerintah Pretoria sehingga rezim itu menekan mereka dengan menggunakan kekerasan negara darurat.

Bagi Prancis, kebijakan apartheid yang diterapkan oleh pemerintah Pretoria bertentangan dengan konsep HAM dalam Konstitusi Prancis 1958 karena pemerintah Pretoria menjauhkan penduduk nonkulit putih dari prinsip *Déclaration des Droits de L'homme et du Citoyen* yang dicantumkan di bagian preambule Konstitusi 1958. Penduduk non-kulit putih itu mendapatkan perlakuan diskriminatif antara lain tidak dapat mengeluarkan aspirasi politiknya karena tidak mendapat perwakilan di parlemen, dapat ditangkap tanpa bukti dan diadili tanpa pengacara ketika mengungkapkan pandangan antipemerintah Pretoria, hanya boleh menempati lahan tandus, dan diperlakukan sebagai strata kedua di ruang publik.

Pada 1988, Mitterand pernah menyatakan bahwa pelaku utama kejahatan HAM di Afrika Selatan adalah pemerintah kulit putih Afrika Selatan (*Le Monde* 6 April 1988). Prancis masa Mitterand itu bukanlah pemerintahan Prancis yang kali

pertama menyatakan ketidakberpihakan Prancis terhadap cara rasialis pemerintah Pretoria dalam memimpin Afrika Selatan itu. Sejak sidang Majelis Umum Pertama PBB tahun 1946, Prancis telah menyatakan diri sebagai sebuah negara antiapartheid, namun semua periode pemerintahan Prancis sebelum periode pemerintahan Mitterand cenderung menjaga hubungan bilateral dengan pemerintah Pretoria yang diejawantahkan dalam kerja sama ekonomi dan persenjataan dan menjadikan Paris sebagai tempat lobi para politikus pemerintahan Pretoria (Alleg 181).

Sejak dekade 1960, transaksi senjata Prancis-Afrika Selatan terus meningkat. Prancis mengaku bahwa embargo senjata ke Afrika Selatan bukanlah pilihan utama untuk pertahanan, tetapi ditujukan untuk represi internal. Partner perdagangan Afrika Selatan itu berpendapat bahwa pengisolasian Afrika Selatan dan pengeluarannya dari sistem PBB dan badan internasional lain akan bersifat tidak produktif (*counter-productive*). Hasilnya, investasi Prancis terus berlanjut sampai masa d'Estaing.

Sampai akhir pemerintahan d'Estaing, Prancis turut andil dalam kelanggengan rezim Pretoria karena tetap melakukan kerjasama ekonomi dengan Afrika Selatan. Hal itu diungkapkan oleh Mr. Abdulrahim A. Farah, ketua Special Committee Apartheid PBB di saat rapat Komite ke-138 bahwa Prancis seakan menyemangati negara-negara anggota tetap DK PBB untuk mengabaikan resolusi DK PBB untuk Afrika Selatan (*The United Nations and Apartheid* 312). Contohnya, saat itu Prancis masih mengimpor domba karakul, sejenis domba terbaik Afrika, dari Namibia, padahal Prancis mengetahui bahwa pendapatan nasional Namibia waktu itu masih dikuasai oleh rezim Pretoria.

Mitterand diwarisi masalah apartheid Afrika Selatan yang belum selesai itu dari pendahulunya, Valéry Giscard d'Estaing. Naiknya presiden sosialis pertama Prancis itu berpotensi untuk meruntuhkan rezim Pretoria dengan cara memutus hubungan bilateral Prancis dengan Afrika Selatan. Pada masa Mitterand itu, Prancis menjadi satu-satunya negara yang memiliki agenda kebijakan luar negeri anti-apartheid usulan partai mayoritas, Parti Socialiste dan Paris menjadi tuan rumah bagi segala kegiatan internasional yang berhubungan dengan antiapartheid Afrika Selatan itu. Parti Socialiste pimpinan Mitterand itu menilai

bahwa apartheid bertentangan dengan konsep sosialisme ala Parti Socialiste yang menekankan pembelaan terhadap demokrasi dan HAM.

Satu bulan sebelum Pemilu presiden Prancis 1981, PS merumuskan agenda kebijakan luar negeri Prancis untuk menentang pemerintah rasialis Pretoria (Whiteman 331). Sehari sebelum Mitterand dilantik menjadi presiden, PS (melalui Sekjen PS Lionel Jospin) mengungkapkan kebijakan luar negeri antiapartheid itu dalam Konferensi Internasional Sanksi dan Embargo PBB bagi Afrika Selatan yang diselenggarakan di Paris. Isi agenda itu adalah Prancis akan menghapus seluruh kegiatan perdagangan uranium di Namibia, menolak impor segala barang buatan Afrika Selatan, menghapus seluruh investasi Prancis di Afrika Selatan, mendukung embargo senjata ke Afrika Selatan secara total, dan memberikan bantuan yang diperlukan kepada negara-negara yang diserang oleh Afrika Selatan (Marchand 45). Pada akhir tahun pertama pemerintahan Mitterand, Menteri Pertahanan Prancis J.P. Chevènement menyatakan di Paris pada 6 Oktober bahwa Prancis telah melakukan sebagian dari kebijakan luar negeri itu, yaitu Prancis telah melakukan embargo senjata PBB secara total untuk Afrika Selatan (Marchand 49).

Ketika Mitterand menjadi presiden, ia tidak pernah meminta nasihat kepada *Assemblée Nationale*, ataupun kepada menteri-menternya mengenai tindakan Prancis terhadap Afrika Selatan (Howorth 599). Dalam hal itu, Mitterand memanfaatkan kekuasaan penuh presiden dalam hal pengambilan kebijakan untuk hubungan luar negeri, pertahanan, dan keamanan nasional seperti yang diatur dalam Konstitusi 1958.

Untuk menentang pemerintah Pretoria itu, pemerintahan Mitterand tidak hanya berhenti melakukan tindakan sebagai negara mandiri, namun kemudian tampil sebagai salah satu negara anggota PBB. Pada masa itu, Prancis cenderung melakukan melalui PBB untuk mengintervensi konflik dalam negeri negara lain karena Komunitas Masyarakat Eropa¹ masih mengikuti agenda kemanusiaan PBB. Prancis juga tidak terlalu memanfaatkan posisinya di NATO karena belum dapat menandingi pengaruh Amerika Serikat yang kuat di organisasi itu

¹ Komunitas Masyarakat Eropa nantinya menjadi Uni Eropa. Intervensi Uni Eropa terhadap konflik dalam negeri yang pertama kali terjadi pada 1996 di Kongo setelah Uni Eropa memiliki struktur ESDP (Keamanan dan Pertahanan Uni Eropa) (Howorth 69).

(Whiteman 331). Mitterand sendiri pernah menyatakan bahwa politik Prancis adalah politik PBB dalam Sidang Majelis Umum PBB 24 September 1990 di Markas PBB New York (Allain 951). Maksudnya adalah Mitterand cenderung mengintervensi konflik internasional melalui kapasitasnya sebagai anggota tetap DK PBB.

Selama masa pemerintahannya, Mitterand jarang hadir di PBB dan biasanya mengirimkan wakilnya. Mitterand hanya hadir tiga kali di Sidang Majelis Umum PBB dengan tema pidato sebagai berikut; bahwa sanksi dan embargo PBB untuk Afrika Selatan harus menjadi alat penghukuman yang setara dengan korban-korban apartheid yang telah meninggal dunia (Sidang Majelis Umum PBB 1985), bahwa Prancis tidak lagi mempunyai senjata kimia (Majelis Umum PBB 29 September 1988), dan bahwa masih ada ketidakseriusan negara anggota PBB dalam penerapan resolusi PBB untuk menekan rezim Pretoria (Majelis Umum PBB September 1989) (Allain 947).

Ketika Mitterand menjadi presiden, kampanye anti-apartheid Mitterand yang pertama dan yang paling diingat terjadi pada 20 Oktober 1981 di suatu pertemuan tidak resmi PBB (bukan Sidang Majelis Umum). Pada pertemuan itu, Mitterand meminta negara Barat menerapkan resolusi DK PBB untuk meruntuhkan rezim Pretoria (*The United Nations and Apartheid* 35).

3.2 Peran Prancis dalam upaya penghapusan apartheid Afrika Selatan

Secara polemologis, Prancis masa Mitterand berada dalam suprastruktur PBB sehingga berperan dalam tahapan kuantitatif untuk turut andil menghapus apartheid Afrika Selatan. Di tahapan kuantitatif, Prancis selalu bersikap mendukung 19 resolusi itu tanpa mengeluarkan hak veto atau abstain. Namun, hanya 14 resolusi yang menjadi mandat karena adanya penggunaan hak abstain oleh Amerika Serikat dan Inggris. Berikut penulisannya secara polemologis.

$$(15-15=0) \times 14 \text{ resolusi}$$

Karena hitungan konstituante adalah 15 atau kurang dari angka patokan 6, maka ke-14 resolusi itu memungkinkan proses perdamaian di Afrika Selatan bersifat optimis. Untuk menerapkan ke-14 resolusi itu, Prancis-lah satu-satunya negara anggota tetap DK PBB yang paling berpotensi menekan rezim Pretoria dibanding

negara anggota tetap lain. Amerika Serikat masih menggunakan hak abstain dan lebih berminat mengintervensi Perang Irak-Kuwait². Inggris juga masih mengeluarkan hak abstain dan PM Inggris Margaret Thatcher menyatakan bahwa Inggris tidak ingin turut campur urusan dalam negeri Afrika Selatan (Mandela 591), sedangkan Rusia dan Cina tidak pernah mendeklarasikan negaranya menentang apartheid Afrika Selatan dan lebih berfokus pada dinamika komunisme di dalam negeri³.

Di PBB, Prancis bertindak berdasarkan Piagam PBB dan mengemban wewenang dan fungsinya sebagai anggota tetap DK PBB. Ketika menyetujui 14 resolusi di atas, artinya Prancis melaksanakan tanggung jawabnya untuk “menjaga perdamaian dan keamanan internasional” yang tercantum dalam Pasal 6 ½ dan memungkinkan pemerintah Pretoria menghapus hukum apartheid.

Berikut akan dijabarkan peran Prancis di tahapan kualitatif. Dalam tahapan *preventive diplomacy*, Prancis tidak hanya mengirimkan *observer* ke Afrika Selatan, tetapi juga melakukan kampanye anti-apartheid ke negara anggota PBB, dan membuka Paris sebagai kota bantuan para aktivis anti-apartheid. Kampanye anti-apartheid ke luar negeri dimulai ketika penasehat presiden Mitterand dan menteri-menteri Prancis datang ke dua negara yang diserang Afrika Selatan (Namibia dan Angola) tahun 1981 sebagai simbol dukungan Prancis terhadap kemanusiaan (Marchand 46). Di tahun yang sama, Mitterand datang ke Konferensi Tingkat Tinggi Prancis-Afrika di Kinsasha tempat di mana Mitterand menyatakan bahwa Prancis adalah sekutu utama organisasi-organisasi pergerakan anti-apartheid. Setahun berikutnya, Mitterand datang ke Kamerun. Dalam pidatonya di sana, Mitterand menyebutkan Prancis mendukung segala bentuk penghapusan apartheid Afrika Selatan. Pada 10 Mei 1990, Prancis menjadi negara pertama yang dikunjungi de Klerk dalam tur Eropa anti-apartheid

² Konflik bermula ketika Preiden Irak, Saddam Hussein, mengklaim ladang minyak di daerah perbatasan Irak-Kuwait sebagai milik negara Irak.

³ Rusia menghadapi gejolak dari 15 negara satelit dan pemberontakan frontal kaum Muslim Chechnya, sedangkan Cina menghadapi krisis ekonomi dalam negeri dan pemberontakan warga sipil. Tidak berhasil melobi ke-15 negara itu, pemerintah Rusia membagi dana persatuan komunis ke luar negeri, contohnya kepada Partai Komunis Afrika Selatan dan Partai Komunis Angola untuk mempertahankan ideologi komunisme, sedangkan Cina mengalami pergolakan mahasiswa yang menginginkan pembaharuan pemerintahan yang mencapai klimaks pembantaian mahasiswa oleh tentara di Lapangan Tianamen 1989. PBB mengkonfirmasi bahwa tindakan itu adalah pelanggaran HAM terbesar sepanjang sejarah Cina.

(<http://www.articles.latimes.com/>). Empat tahun kemudian, Mitterand melakukan kunjungan kenegaraan ke Afrika Selatan sebagai bentuk dukungan terhadap pendirian negara Afrika Selatan yang demokratis. Saat inagurasi Presiden Mandela itu, Mitterand adalah pemimpin Eropa pertama yang datang di Bandara Internasional D. F. Malan, Cape Town (*Sun Journal* dalam <http://www.news.google/newspapers/>).

Pada 1981 Paris mulai menjadi kota “pengaduan” para aktivis anti-apartheid. Pada tahun tersebut, para wakil dari negara-negara Afrika, yang diserang Afrika Selatan, disambut Mitterand. Negara-negara itu meminta dukungan militer Prancis untuk menekan pemerintah Pretoria. Prancis kemudian mengirimkan suplai senjata kepada organisasi-organisasi pergerakan di Afrika Selatan dan Namibia. Pada 29 Maret 1988, Mitterand menerima kunjungan para aktivis ANC untuk membantu proses pelepasan Mandela dan sekutunya⁴. Setelah bebas dari penjara, Mandela pergi ke tiga negara anggota tetap DK PBB, Prancis, Amerika Serikat, dan Inggris. Di Prancis, Mandela disambut oleh Mitterand, Danielle Mitterand (ibu negara), dan 3.000 pemuda anti-apartheid Prancis yang menunggu kedatangannya di halaman depan Élysées. Pada 10 Mei 1990, de Klerk ke Paris lagi untuk meminta bantuan Prancis menjadi pihak mediator antara pemerintah Pretoria dan organisasi-organisasi pergerakan (*Le Monde* 10 Mei 1990). Prancis kemudian mengirimkan ahli perdamaian ke Afrika Selatan.

Peran Prancis dalam *preventive diplomacy* yang dipaparkan dalam dua paragraf terdahulu merupakan implementasi dari substansi Resolusi DK PBB 610 (1988) 16 Maret 1988, 615 (1988) 17 Juni 1988, 765 (1992) 16 Juli 1992, 772 (1992) 17 Agustus 1992, dan 894 (1994) 14 Januari 1994. Substansi sembilan resolusi itu berfokus pada ketegasan negara anggota tetap DK PBB untuk melakukan segala cara dalam menghapus apartheid. Khusus untuk kunjungan Mitterand ke inagurasi Presiden Mandela, hal itu merupakan penerapan dari Resolusi DK PBB S/RES/919 (1994) 25 Mei 1994 dan 930 (1994) 27 Juni 1994 yang berfokus pada apresiasi negara anggota tetap DK PBB terhadap keberhasilan pemilihan umum Afrika Selatan.

⁴ Pada 20 Februari 1990, 30.000 warga Prancis melakukan demonstrasi untuk mendesak Mitterand agar segera melepaskan Mandela dan sekutunya (*Le Monde* 22 Februari 1990).

Prancis mengawali perannya dalam tahapan *peace-making* dengan meresmikan kantor perwakilan ANC dan SWAPO di Paris. Peran Prancis itu berlandaskan Resolusi DK PBB 591 (1986) 28 November 1986 yang substansinya berfokus pada pengambilan tindakan yang tepat oleh negara anggota tetap DK PBB untuk memfasilitasi penduduk non-kulit putih. Dalam hal itu, Mitterand meresmikan Paris sebagai sebuah *la terre d'accueil* bagi hal apapun yang berhubungan dengan penghapusan apartheid. Pada 20-27 Mei 1981, Paris menjadi tempat Konferensi Perdana sanksi PBB menentang Afrika Selatan⁵ sekaligus dijadikan saksi mata pembacaan Deklarasi menentang Afrika Selatan di hari terakhir konferensi itu⁶. Deklarasi itu dinyatakan sebagai bukti persatuan pandangan seluruh negara yang anti-apartheid untuk yang pertama kalinya⁷. Pada 16-20 Juni 1986, Prancis menjadi tuan rumah Konferensi Dunia mengenai Sanksi PBB menentang pemerintah Pretoria⁸ yang diselenggarakan di Paris. Hasil dari konferensi ini berupa pandangan PBB bahwa apartheid Afrika Selatan dapat dihapuskan dengan segera dengan cara penerapan sanksi dan embargo DK PBB oleh seluruh negara di dunia, tidak hanya negara-negara anggota PBB. Prancis kemudian membatalkan seluruh kerjasama ekonomi dengan Afrika Selatan dan hanya meninggalkan sekitar 90 perusahaan Prancis di sana (<http://www.independent.co.uk/news/world/the-week-ahead-mitterand-visit-to-sa-aims-to-boost-economic-links-1411491.html>).

Dalam bidang olahraga, Prancis menghentikan kerja sama olahraga rugby⁹ dengan Afrika Selatan pada 1983. Prancis melarang Federasi Rugby Prancis melakukan kerja sama olahraga dengan Afrika Selatan, padahal saat itu Prancis adalah teman tanding utama tim rugby Afrika Selatan. Dua tahun kemudian,

⁵ *First International Conference on Sanctions against South Africa* ini diadakan oleh Special Committee against Apartheid yang bekerjasama dengan OAU. Kesimpulan dari Konferensi itu didokumentasikan dalam A/RES/34/93 C, A/36/319-S/14531, dan A/CONF.107/8 oleh PBB.

⁶ Isi deklarasi didokumentasikan dalam A/CONF.107/8 oleh PBB.

⁷ Mengikuti konsultasi dari Konferensi itu, Komite Spesial PBB menentang Apartheid mengizinkan pembentukan sebuah Komite Artis Dunia menentang Apartheid (*Committee of World Artists against Apartheid*) di bawah arahan seorang seniman Spanyol, Antonio Saura (Marchand 75).

⁸ Kesimpulan dari *World Conference on Sanctions Against Racist South Africa* didokumentasikan dalam A CONF.137/5 oleh PBB. Konferensi itu diadakan oleh PBB bekerjasama dengan OAU dan negara-negara non-blok.

⁹ Olahraga rugby merupakan jenis olahraga yang paling digemari oleh kaum kulit putih Afrika Selatan. Majelis Umum pertama kalinya meminta boikot olahraga Afrika Selatan pada 1968 (Marchand 76). Prancis adalah sahabat utama Afrika Selatan dalam cabang olahraga itu.

Prancis menjadi tuan rumah Konferensi Internasional II Boikot Olahraga semua cabang untuk menentang Afrika Selatan¹⁰ di Paris.

Dalam bidang sosial dan budaya, Prancis adalah negara Eropa utama yang mensponsori dana bagi dua konferensi perdamaian untuk Afrika Selatan, yakni *International Seminar on the History of Resistance against Occupation, Oppression and Apartheid in South Africa*, Paris, 29 Maret-2 April 1982¹¹ dan *International Conference on the Educational Needs of the Victims of Apartheid in South Africa*, Paris, 25-27 Juni 1991¹². Prancis juga berperan tahun 1983 ketika Special Committee against Apartheid menyelenggarakan pameran kesenian menentang apartheid di Prancis, Republik Demokratik Jerman, Inggris, dan Amerika Serikat. Pembukaan pameran dilangsungkan di Paris oleh pidato Mitterand (diwakili Menteri Pendidikan Prancis). Tokoh penting Prancis lain dalam peran ini adalah Thierry de Beaucé, sekretaris negara urusan kebudayaan internasional.

Dalam bidang politik, Prancis terbuka bagi seluruh pengungsi anti-apartheid Afrika Selatan yang meminta suaka politik (Olsen 366). Mereka mulai ramai berdatangan ke Prancis sejak tahun 1989. Pada September di tahun yang sama, Mitterand mengirim surat dukungan penuh Prancis terhadap Republik Afrika Selatan yang baru kepada F.W. de Klerk sesaat setelah pidato resmi penghapusan apartheid.

Peran Prancis dalam tahapan *peace-making* yang dipaparkan dalam empat paragraf terdahulu berlandaskan pada Resolusi DK PBB S/RES/560 (1985) tanggal 12 Maret 1985 dan S/RES/591 (1986) tanggal 28 November 1986 yang substansinya menekankan bahwa DK PBB wajib melaksanakan kewajibannya sesuai Piagam PBB untuk segera membentuk Afrika Selatan yang demokratis.

Dalam tahap *peace-keeping* 1990-1994, Prancis berperan dalam masa transisi Afrika Selatan. Setelah Prancis menyambut dan siap membantu

¹⁰ Konferensi Internasional I diadakan di London pada 27-29 Juni 1983. Kesimpulan dari Konferensi Internasional II didokumentasikan dalam A/40/343-S/17224; A/AC.115/L.624 dan Corr.1 oleh PBB.

¹¹ Diselenggarakan oleh Special Committee against Apartheid bekerjasama dengan UNESCO. Isi Seminar didokumentasikan dalam A/AC.115/L.576 oleh PBB.

¹² Diselenggarakan oleh Special Committee against Apartheid and the Advisory Committee of the United Nations Educational and Training Programme for Southern Africa. Isi Konferensi didokumentasikan dalam A/AC.115/L.678; A/AC.115/INF/17 oleh PBB.

pembentukan Republik Afrika Selatan yang baru, Prancis bergabung dengan institusi PBB, yaitu DAC dan *Trust Fund* untuk mendanai kegiatan dialog perdamaian antara pemerintah Pretoria dengan organisasi-organisasi pergerakan. Masa transisi ini identik pula dengan pengiriman wakil-wakil Prancis untuk PBB yang melakukan perjalanan Prancis-Afrika Selatan untuk membantu dialog perdamaian itu (*Le Monde* 11 Mei 1990). Perwakilan Prancis itu difasilitasi oleh UNOMSA (Pengamat PBB untuk Afrika Selatan). Peran Prancis itu berlandaskan Resolusi DK PBB S/RES/765 (1992) tanggal 16 Juli 1992 yang berfokus pada bantuan PBB bagi penduduk non-kulit putih.

Pada Pemilu 1994, Prancis mengirimkan pengamat independen yang tergabung dalam 300 relawan pengamat Komunitas Eropa. Tugas relawan itu adalah bekerjasama dengan pejabat Afrika Selatan setempat dan *observer* untuk menjamin Pemilu 1994 berlangsung tanpa kecurangan politik. Dalam hal itu, Prancis berperan sesuai Resolusi DK PBB S/RES/894 (1994) tanggal 14 Januari 1994 yang substansinya berfokus pada permintaan PBB akan bantuan pengamat Pemilu kepada Komunitas Eropa dan OAU. Selain itu, Prancis mengirim 80 *observer* Pemilu (http://www.lemonde.fr/web/recherche_breve/1,13-0,37-323294,0.html). *Observer* ditempatkan di tiap tempat pemungutan suara untuk membantu proses Pemilu.

Dalam tahap *peace-building* pasca-Pemilu 1994, Prancis kembali berperan. Selain menyumbang untuk DAC, Prancis juga menyumbang dana kepada *International Donors' Conference for Human Resources Development in a Post-Apartheid South Africa* yang mulai beroperasi pada Oktober 1994. Prancis kemudian berkampanye meminta Amerika Serikat, Inggris, dan Jerman untuk menyiapkan bantuan konkret itu. Dalam hal itu, Prancis berperan dalam implementasi Resolusi DK PBB S/RES/930 (1994) tanggal 27 Juni 1994 dan S/RES/930 (1994) tanggal 27 Juni 1994 yang substansinya berfokus pada permintaan PBB akan bantuan dana secepatnya dari Komunitas Eropa dan OAU bagi pemerintahan Mandela.

Selama tahapan kualitatif yang telah dijabarkan itu, Prancis tidak menerapkan resolusi isolasi ekonomi dan embargo senjata DK PBB untuk Afrika Selatan secara total. Kekukuhan Prancis untuk mempertahankan investasinya itu

berlandaskan adanya peran penting Afrika Selatan bagi Prancis. Secara polemologis, Prancis berarti mempunyai semangat pasifisme ekonomi, atau semangat perdamaian berlandaskan kerja sama ekonomi, yaitu Prancis merasa aman jika tetap melakukan hubungan bilateral dengan pemerintah Pretoria. Oleh karena itu, Mitterand melakukan “penerapan sebagian” resolusi DK PBB.

Fungsi DK PBB yang dijalankan Prancis adalah sebagai berikut, yaitu menyelidiki pertikaian apa saja atau keadaan yang dianggap bisa menyebabkan pertentangan internasional dan memberikan rekomendasi mengenai metode-metode penyelesaian pertikaian atau ketentuan-ketentuan penyelesaian. Prancis setuju dengan rekomendasi SekJen PBB untuk membentuk suatu Komite DK PBB yang bertugas meninjau Afrika Selatan. Prancis juga menyerukan kepada negara-negara anggota untuk melaksanakan sanksi-sanksi ekonomi dan tindakan lain tanpa menggunakan kekerasan untuk mencegah atau menghentikan agresi. Fungsi DK PBB yang tidak dijalankan Prancis adalah memformulasikan rencana pembentukan satu sistem untuk mengatur persenjataan; menentukan adanya ancaman terhadap perdamaian atau tindakan agresi dan merekomendasikan tindakan yang harus diambil; mengambil tindakan militer terhadap agresor. Ketika Afrika Selatan melakukan agresi militer ke negara perbatasan (Angola dan Namibia), Prancis memberikan bantuan militer kepada rezim Pretoria.

Demikian analisis mengenai apa saja peran Prancis untuk menghapus apartheid yang bertolak dari pemikiran bahwa apartheid bertentangan dengan konsep HAM Prancis dan konsep sosialisme ala Parti Socialiste. Dalam bab berikut, akan diperinci investasi apa saja yang dimiliki Prancis di Afrika Selatan dan apa sebenarnya yang membuat Prancis masa Mitterand (melalui Parti Socialiste) bergairah menghapus apartheid.

BAB 4

KEPENTINGAN NASIONAL PRANCIS DI AFRIKA SELATAN

Setelah penjabaran dari pandangan umum Prancis dan penguraian dari andil Prancis dalam menghapus apartheid, dalam bab berikut akan ditunjukkan apa saja investasi Prancis dan seberapa penting Afrika Selatan bagi Prancis sehingga Prancis bersemangat menghapus apartheid itu.

4.1 Investasi Prancis di Afrika Selatan

Kerjasama ekonomi Prancis-Afrika Selatan berlangsung mutual sejak zaman pemerintahan de Gaulle dan semakin meningkat pada era d'Estaing ketika Prancis menaruh investasi militernya di Afrika Selatan dan membantu rezim Pretoria memproduksi materi militer secara mandiri.

Dalam pidato deklarasi pembentukan negara Afrika Selatan yang demokratis 24 Maret 1993, Presiden de Klerk mengaku di hadapan anggota parlemen Afrika Selatan bahwa pemerintahannya telah menjalankan program senjata nuklir secara diam-diam selama 15 tahun untuk produksi enam senjata atom dan telah menyiapkan senjata yang ketujuh ketika terjadi pemeriksaan nuklir pada 1989. IAEA¹ menyambut kejujuran Klerk tersebut dan mengobservasi pusat-pusat nuklir di Afrika Selatan. Investigasi IAEA itu menyimpulkan bahwa pengembangan nuklir di Afrika Selatan dibantu oleh Prancis (<http://www.un.org/>).

Divisi Politik Nuklir Luar Negeri Prancis pertama kali membahas nuklir di Afrika Selatan bersama Presiden d'Estaing pada 24 September 1976. Dua minggu setelah terjadi pembantaian kaum nonkulit putih di Soweto, Prancis mengirim bahan nuklir kepada rezim Pretoria (Alleg 175). Pemerintahan Mitterand kemudian mempertahankan kerjasama nuklir dengan Afrika Selatan itu.

Pada 16 November 1982, pemerintah Mitterand mengaku kepada media massa bahwa Prancis telah menjual dan mengonstruksi di Koeberg dua reaktor nuklir², masing-masing berkekuatan 900 Mega Watt sekaligus menjual dan

¹ IAEA adalah institusi PBB yang bertugas mengkaji pusat nuklir dan meminta laporan dari negara-negara empunya nuklir tiap tahunnya.

² Reaktor nuklir disebut juga senjata atom berupa peluru kendali yang nantinya diledakkan di dalam tabung nuklir.

memproses bahan bakar untuk reaktor tersebut. Prancis juga bergabung dengan perusahaan Jerman bersubsidi, CGE-Alsthom, anak perusahaan Stein-Industries, dalam pengumpulan dana 6,5 miliar Franc untuk pembangunan pusat kekuatan nuklir di Transvaal, provinsi Afrika Selatan bagian utara yang berbatasan dengan Botswana, Zimbabwe, Mozambik, dan Swaziland. CGE-Alsthom sendiri telah membangun nuklir di daerah itu yang menghabiskan 1,75 milyar Franc (Marchand 47--48).

Program nuklir Prancis, COGEMA, senilai 7,1 miliar Franc mulai masuk ke Afrika Selatan pada Januari 1981. Dua tahun kemudian, berlangsung penandatanganan kontrak senilai lebih dari 8,6 miliar Franc antara pemerintah Prancis dan 32 perusahaan listrik (termasuk perusahaan Prancis, FRAMATOME) di enam negara, termasuk Afrika Selatan dan Israel (Dickson 127). Program itu bermaksud memproses kembali limbah nuklir yang sebelumnya telah dikeluarkan³. Melalui penelitian CEA, Prancis yakin bahwa limbah nuklir dapat diproses kembali menjadi bahan bakar seperti yang sebelumnya telah berhasil dilakukan dalam Program Super-Phenix. Mendukung program COGEMA itu, Menteri Energi Edmond Hervé menyatakan bahwa Prancis telah berhasil mengembangkan kerjasama nuklir dan siap menjadi negara pemimpin teknologi nuklir dunia. Padahal dalam kampanye PS untuk Pemilu presiden, Mitterand berjanji menghentikan program nuklir COGEMA-nya d'Estaing tersebut (disebut juga La Hague karena pusat perlengkapan nuklir COGEMA berada di La Hague, Prancis utara).

Setelah berkontribusi besar dalam bentuk perlengkapan militer yang terkuat dan terancang untuk polisi dan militer Afrika Selatan, Prancis menjadikan negara itu sebagai negara Afrika perdana yang memiliki nuklir⁴. Dari perspektif

³ Pada awalnya, proposal program ini ditolak oleh CEA (Komisi Prancis untuk Urusan Nuklir) karena CEA telah mengeluarkan banyak dana (8 milyar Franc) untuk program yang sama pada masa d'Estaing, sementara CFDT (Konfederasi Buruh Prancis) mengkritik program ini terkait dengan keselamatan para buruh selama program ini diterapkan di enam negara itu.

⁴ Ketika Mitterand melakukan kunjungan ke Gabon tahun 1981, presiden Gabon pada saat itu meminta Prancis mengembangkan setidaknya sebuah reaktor nuklir di negara itu, namun Mitterand lebih tertarik mengirimnya kepada Afrika Selatan (Whiteman 340).

ini, kebijakan Mitterand tidak berbeda dari para pendahulunya sehingga janji Parti Socialiste tentang penghapusan nuklir⁵ tidak pernah dilakukan.

Pada 19 Januari 1982, SABC (Media Penyiaran Berita Afrika Selatan) telah mensinyalir pengabaian Prancis terhadap embargo ekonomi dan senjata DK PBB itu setelah Kebijakan Ekspansi Ekonomi 1982 diresmikan oleh Kedutaan Besar Prancis di Johannesburg⁶ yang meresmikan 20 misi perdagangan Prancis ke Afrika Selatan. Prancis kemudian tetap mempertahankan kerja sama ekonomi dengan rezim Pretoria.

Berikut kerja sama ekonomi Prancis-Afrika Selatan yang lebih rinci (Marchand 47). Pada 22 Juli 1981, Renault menandatangani pembaharuan kontrak penjualan tipe R5 di Afrika Selatan. Sejumlah 8.000 R5 laku dijual pada 1981. Pada Oktober 1981, *London Times* mengungkapkan adanya para teknisi Israel di Afrika Selatan yang melakukan servis teratur bagi pesawat buatan Prancis dengan menggunakan suku cadang yang dijual Prancis ke Israel untuk Mirage⁷. Pada Agustus 1982, Prancis mempresentasikan beberapa perusahaan publik Prancis, yaitu Gaz de France dan National Center for Scientific Research dalam Konferensi Konversi Batu Bara menjadi Minyak. Pada Oktober 1982, *Paris Chamber of Commerce*⁸ menandatangani kontrak kerja sama perdagangan dengan Johannesburg Chamber of Commerce. Kontrak itu adalah kontrak perdagangan terbesar yang pernah dilakukan rezim Pretoria. Pada November 1982, Prancis kemudian memberikan pinjaman⁹ sebesar \$1,1 juta melalui IMF kepada pemerintah Pretoria.

Berdasarkan penelitian tahun 1983, Prancis melakukan impor 65,2 % produk energi, bahan bakar, agrikultur, dan makanan dari Afrika dan melakukan

⁵ Sebagai pemimpin partai sosialis, Mitterand pernah menyatakan PS akan mengedepankan gencatan nuklir Prancis (Cole 133).

⁶ Kebijakan itu menjadi kebijakan ekonomi paling efektif yang pernah dilakukan Prancis dan menjadi kunci utama kontrak bisnis apapun yang terjadi antara Prancis dan Afrika Selatan.

⁷ Polisi dan tentara Afrika Selatan mendapatkan senjata buatan Prancis melalui negara-negara dunia ketiga (Marchand 49). Sejak tahun 1976, Afrika Selatan sendiri sudah memiliki 16 unit Mirage buatan Atlas Air Corporation setelah mendapat lisensi dari Prancis. Mirage yang diproduksi antara lain pesawat perang Mirage tipe F1 Marcel Dassault yang berbentuk tipis dan ringan sehingga dapat bergerak gesit di udara. 32 Mirage tipe itu diberikan oleh Prancis pertama kalinya kepada Afrika Selatan pada 1971 (Alleg 159).

⁸ Sebuah perusahaan konsultan perdagangan yang berada di bawah pengawasan negara Prancis.

⁹ Bank-bank nasional Prancis juga tetap memberikan pinjaman uang kepada Pretoria (Marchand 48).

50 % ekspor manufaktur ke Afrika. Di antara negara-negara Afrika itu, Afrika Selatan adalah penyedia utama Prancis bahan mentah, seperti: batu bara, uranium¹⁰, mangan, titanium, platinum, dan berlian. Prancis juga membuka lebih dari delapan puluh pabrik pengolahan bahan-bahan mentah itu senilai 500 juta Rand di negeri pelangi itu¹¹ (Martin 195).

Sementara itu, perusahaan Total¹² tetap melakukan kerja sama produksi minyak mentah dan mendistribusikannya ke seluruh wilayah Afrika Selatan¹³. Setelah meraih 12 % pasar minyak Afrika Selatan pada awal 1980, Total memonopoli perdagangan minyak untuk kepentingan polisi Afrika Selatan. COFACE¹⁴, perusahaan asuransi Prancis untuk perdagangan asing, tetap melayani transaksi perdagangan Prancis di Afrika Selatan. Perubahan yang terjadi adalah potongan jaminan dari tujuh menjadi lima tahun. ATIC, perusahaan publik Prancis yang memfasilitasi impor lebih dari 8 juta ton batu bara dari Afrika Selatan¹⁵, menyatakan pada Februari 1982, bahwa tidak ada satu pun negara langganan (termasuk Prancis) yang menghentikan pemasokan batu bara Afrika Selatan.

Pasar elektronik dan televisi Prancis juga paling berkembang di antara pasar lain di Afrika Selatan setelah adanya sabotase. Hal itu dinyatakan oleh Seksi Ekspansi Ekonomi Kedutaan Besar Prancis di Johannesburg. Sabotase yang dimaksud adalah sabotase jalur kereta api dan listrik yang dilakukan oleh Umkhonto We Sizwe.

Setelah melihat deskripsi investasi Prancis di Afrika Selatan, ternyata bahwa Prancis tidak sepenuhnya memenuhi janji anti-apartheid PS. Dalam hal itu, sosialisme dan PS adalah dua hal yang berbeda. PS memiliki anggota yang berideologi sosialis, yang menekankan pada hajat hidup orang banyak yang dikuasai negara sehingga masih melihat untung-rugi dari kasus Afrika Selatan.

¹⁰ Pada 1982, Afrika memberi pasokan 35 % uranium untuk negara-negara Barat (termasuk Prancis) dan produsen utamanya adalah Afrika Selatan dengan jumlah pasokan 15 % (Martin 197). Impor uranium Prancis dari Afrika Selatan dan Namibia meningkat 43 % pada 1980–1981 (Whiteman 331).

¹¹ Julukan Afrika Selatan dalam turisme adalah *The Rainbow Nation*.

¹² Pada waktu itu 40 % aset Total dimiliki oleh negara.

¹³ Pada tahun tersebut, OPEC telah mengembargo minyak ke Afrika Selatan.

¹⁴ Dinasionalisasi pada masa Mitterand.

¹⁵ Pada dekade 1980, harga batu bara dari Afrika Selatan lebih murah 30 % dibandingkan batu bara dari negara lain karena pemberian upah yang murah bagi buruh Afrika Selatan.

Secara ideal, PS menekankan bahwa ideologi apartheid tidak bersesuaian dengan ideologi sosialisme, namun dalih itu adalah jalan Mitterand untuk mendapat simpati dari mayoritas rakyat Prancis yang antiapartheid.

Pada 2 April 1982 ketika Pemimpin Komite PBB Antiapartheid Mr. Alhaji Maitama Sule mengunjungi Mitterand di Paris untuk meminta nasihat perdamaian bagi Afrika Selatan (Whiteman 333). Kunjungan itu tidak ditanggapi dengan solusi perdamaian. Sebaliknya, Mitterand (melalui Menteri Perdagangan Jean-Pierre) menanggapi bahwa penghentian kerja sama Prancis-Afrika Selatan akan tidak efektif bagi kedua negara.

4.2 Peran Penting Afrika Selatan bagi Prancis

Pada 1986, PBB mengkritik Prancis karena tidak melakukan implementasi empat belas resolusi embargo ekonomi dan senjata DK PBB untuk Afrika Selatan yang telah disetujuinya. Berbanding terbalik dengan empat belas itu, Prancis tidak hanya mempertahankan kerja sama ekonomi, tetapi juga menjalin kerja sama militer dengan rezim Pretoria. Prancis berpendapat bahwa isolasi Afrika Selatan tidak produktif karena pemerintah Pretoria akan semakin menekan penduduk kulit hitam.

Pada awalnya, Prancis berupaya menjauhkan Afrika Selatan dari kekuatan komunis Rusia. Prancis menilai bahwa Rusia juga berupaya menjadikan Afrika Selatan sekutu politiknya setelah negara itu berhasil menggagat rezim Pretoria yang bersama Rusia turut membantu keberlangsungan Partai Komunis MPLA Angola. Prancis kemudian berhasil melobi Afrika Selatan untuk bersama Prancis menyerang Angola untuk mengusir kekuatan Rusia di sana dengan cara mendukung keberlangsungan Partai UNITA Angola. Pada masa itu, terdapat konflik antara dua partai besar di Angola, yaitu antara MPLA dan UNITA untuk menentukan calon presiden. Rusia dan Kuba membantu MPLA, sedangkan Prancis dan Afrika Selatan membantu UNITA (*World Almanac 2009* 731).

Tentara Rusia mulai berdatangan ke Angola untuk membantu MPLA menyerang para anggota UNITA. Tentara Prancis dan Afrika Selatan membantu UNITA untuk mengusir tentara Rusia (yang dibantu oleh tentara Kuba) itu melalui wilayah perbatasan Namibia-Angola. Prancis kemudian meminta

dukungan Israel untuk mengirim persenjataan kepada tentara Afrika Selatan yang telah tiba di Angola dan menempatkan kapal perang di perairan perbatasan Afrika Selatan-Mozambik setelah Prancis melobi pemerintah Mozambik dan menempatkan perlengkapan militer dan tentara di sana. Prancis bermaksud jika Rusia dan tentara Angola yang pro Rusia berhasil mengalahkan tentara Prancis dan Afrika Selatan dan masuk ke Afrika Selatan untuk menyerang balik dari arah barat, Prancis sudah siap dari arah timur. Ide brilian itu datang dari Menteri Luar Negeri Claude Cheysson (Whiteman 334).

Lobi Prancis terhadap Afrika Selatan untuk menyerang pasukan komunis Rusia di Angola adalah indikasi Prancis tidak ingin kehilangan Afrika Selatan yang sebelumnya dilobi Rusia untuk membela Partai Komunis Angola, MPLA. Pasca-perang dingin, Prancis cenderung tampil sebagai negara yang mewakili Eropa dalam menandingi kekuatan politik Amerika Serikat dan Rusia. Pada masa Mitterand, kedua negara itu telah banyak mendapatkan sekutu politik di Timur Tengah dan Asia. Oleh karena itu, Prancis mengincar Afrika sebagai peluang terbesar untuk mencari sekutu politik.

Ambisi Prancis itu tidak hanya berdasarkan kemampuan dan kepentingan nasionalnya sendiri, tetapi membawa kewibawaan politis negara-negara Eropa. Dalam perspektif itu, peran Prancis adalah berusaha membatasi Amerika Serikat dan Rusia. Prancis memasukkan Afrika Selatan sebagai “koneksi Prancis” karena melihat bahwa keberhasilan negara Eropa menandingi Amerika Serikat dan Rusia dinilai dari keberhasilan Prancis mempertahankan hubungan bilateral dengan rezim Pretoria.

Afrika Selatan mendapat tempat spesial di Prancis karena pada awalnya Prancis menilai Afrika Selatan yang masih apartheid itu adalah pintu gerbang untuk mendapatkan sekutu negara-negara Afrika bagian selatan, yaitu Angola, Namibia, Botswana, Zimbabwe, Afrika Selatan, Lesotho, Mozambik, dan Swaziland. Pada saat itu, negara tetangga Afrika Selatan masih bergantung pada Afrika Selatan. Sebagai contoh, kehidupan penduduk Botswana masih bergantung hampir 100 % pada perdagangan berlian, nikel, dan batu bara yang dijual ke Afrika Selatan, 25 % pasokan listrik Namibia berasal dari Afrika Selatan, 70 % kekayaan lahan Zimbabwe masih diurus oleh kaum kulit putih yang beraliansi erat

dengan rezim Pretoria, dan lebih dari 50 % pemasukan Lesotho berasal dari pajak warga negaranya yang bekerja di Afrika Selatan (Martin 197 dan *World Almanac 2009* 739,835).

Afrika Selatan adalah lahan pekerjaan bagi warga negara Prancis. Setelah penyerangan Afganistan¹⁶ pada akhir 1979, negara-negara OPEC¹⁷ membatasi ekspor minyak ke negara-negara Barat, termasuk Prancis. Oleh karena itu, Prancis terkena krisis ekonomi yang hebat. Hal yang paling dicatat dalam sejarah kontemporer Prancis adalah pengangguran yang semakin meningkat pada dekade 1980. Penerapan Kebijakan Ekonomi Ekspansi 1982 di Afrika Selatan dianggap dapat memberikan lapangan pekerjaan bagi warga negara Prancis di 20 perusahaan Prancis di Afrika Selatan. Warga negara Prancis juga semakin banyak berdatangan ke Afrika Selatan untuk bekerja setelah investasi Prancis berkembang di Afrika Selatan seperti yang dirinci dalam 4.1. Keuntungan yang didapat Prancis juga termasuk reduksi biaya penggajian bagi para buruh kaum non-kulit putih Afrika Selatan yang bekerja di perusahaan-perusahaan Prancis. Mereka bergaji rendah karena diatur dalam UU Buruh Afrika Selatan yang menyebutkan upah buruh kaum kulit hitam dan kulit berwarna lebih rendah dari kaum kulit putih (Alleg 29,32).

Ketika penduduk Afrika Selatan mengalami dinamika pada dekade 1980, Prancis sadar bahwa rezim Pretoria sedang menuju keruntuhannya dan kaum non-kulit putih akan menduduki mayoritas kursi parlemen. Pada saat itu, organisasi-organisasi pergerakan anti-apartheid mulai meneror kerabat dan koneksi rezim Pretoria karena kekuatan mereka menguat seiring dengan bertambahnya jumlah anggota. Pada saat itu, perbandingan kaum kulit hitam dan kaum kulit putih adalah 5:1 dengan perincian 73 % kaum kulit hitam atau sekitar 21 juta jiwa, 16 % kaum kulit putih atau sekitar 4,5 juta jiwa, dan sisanya 10 % adalah kaum kulit berwarna (Maguire 73). Organisasi-organisasi pergerakan itu membuat bom yang tidak hanya ditujukan bagi pemerintah sipil, tetapi juga bagi keluarga mereka.

¹⁶ Kaum komunis Rusia melakukan kudeta berdarah tahun 1978. Pada Desember 1979, komunis mulai menyerang Kabul dan mendukung kudeta negara itu agar dipilih pemimpin yang prokomunis. Setidaknya 15.000 pemberontak muslim Afganistan dan tentara Rusia dilaporkan tewas (*World Almanac 2009* 729).

¹⁷ Sejak 1973, OPEC memproklamkan naiknya harga minyak bagi negara-negara Barat (termasuk Prancis) yang terlibat dalam Perang Afghanistan.

Persenjataan dari luar negeri yang dikirim untuk polisi dan tentara Afrika Selatan juga dibom, dicuri, dan dirusak. Prancis adalah salah satu negara yang mengirim persenjataan itu, namun setelah menyadari kekuatan kaum non-kulit putih yang tergabung dalam organisasi-organisasi pergerakan anti-apartheid, Prancis menyuplai bantuan persenjataan kepada organisasi pergerakan anti-apartheid yang paling berpengaruh pada saat itu, Umkhonto we Sizwe¹⁸.

Pemerintahan Mitterand juga mulai bersikap tidak bersahabat kepada duta besar rezim Pretoria setelah mata-mata Afrika Selatan mengacau kegiatan anti-apartheid di Paris. Pada September 1988, seorang aktivis anti-apartheid Prancis, de Dulcie dibunuh, maka Mitterand langsung memanggil Duta Besar Afrika Selatan untuk Prancis, Hendrik Geldenhuys, ke kantor presiden di Élysées untuk dimintai keterangan. Sebulan setelah itu, Mitterand (melalui Menteri Luar Negeri Jean-Bernard Raymond) menolak surat Afrika Selatan untuk Prancis yang berisi hukuman penjara selama empat tahun kepada Pierre-André Albertini, seorang pengamat antiapartheid Prancis (“Pour protester contre l’incarcération de Pierre-André Albertini M. Mitterrand va refuser les lettres de créances du nouvel ambassadeur sud-africain.”).

Sejak keruntuhan komunisme 1989, Prancis yakin tidak mempunyai saingan politik lagi di selatan Afrika sehingga Prancis mendekati Afrika Selatan dengan strategi baru, yaitu mendapatkan simpati politis negara-negara tetangga Afrika Selatan yang anti-apartheid. Sejak saat itu, Prancis semakin “bergairah” membantu organisasi-organisasi pergerakan untuk menggulingkan rezim Pretoria sehingga nantinya Prancis dapat menjalin kerja sama dengan pemerintahan mayoritas kaum non-kulit putih. Prancis kemudian merasionalisasi keadaan yang sudah terlanjur terjadi untuk dapat menerapkan resolusi DK PBB. Pemutusan hubungan dengan Afrika Selatan adalah “neraka” bagi kedua negara. ¼ wilayah Afrika Selatan akan hidup tanpa listrik ketika Prancis menutup perusahaan energi nasionalnya dan Prancis akan menerima kepulangan warga negara yang bekerja di Afrika Selatan-termasuk para buruh, pegawai swasta, dan tim ahli-yang nantinya dikhawatirkan akan menambah jumlah angka pengangguran (Marchand 47).

¹⁸ Unit bersenjata ANC itu memiliki jumlah prajurit perdana 21 personil yang dilatih di Jerman dan mendapat suplai persenjataan dari Prancis (Mandela 307). Operasi perdana Umkhonto we Sizwe adalah pengeboman di jalan pada 1985.

Akhirnya Prancis hanya meninggalkan sekitar 90 perusahaan nasional dari keseluruhan investasinya di Afrika Selatan (<http://www.independent.co.uk/news/world/the-week-ahead-mitterrand-visit-to-sa-aims-to-boost-economic-links-1411491.html>).

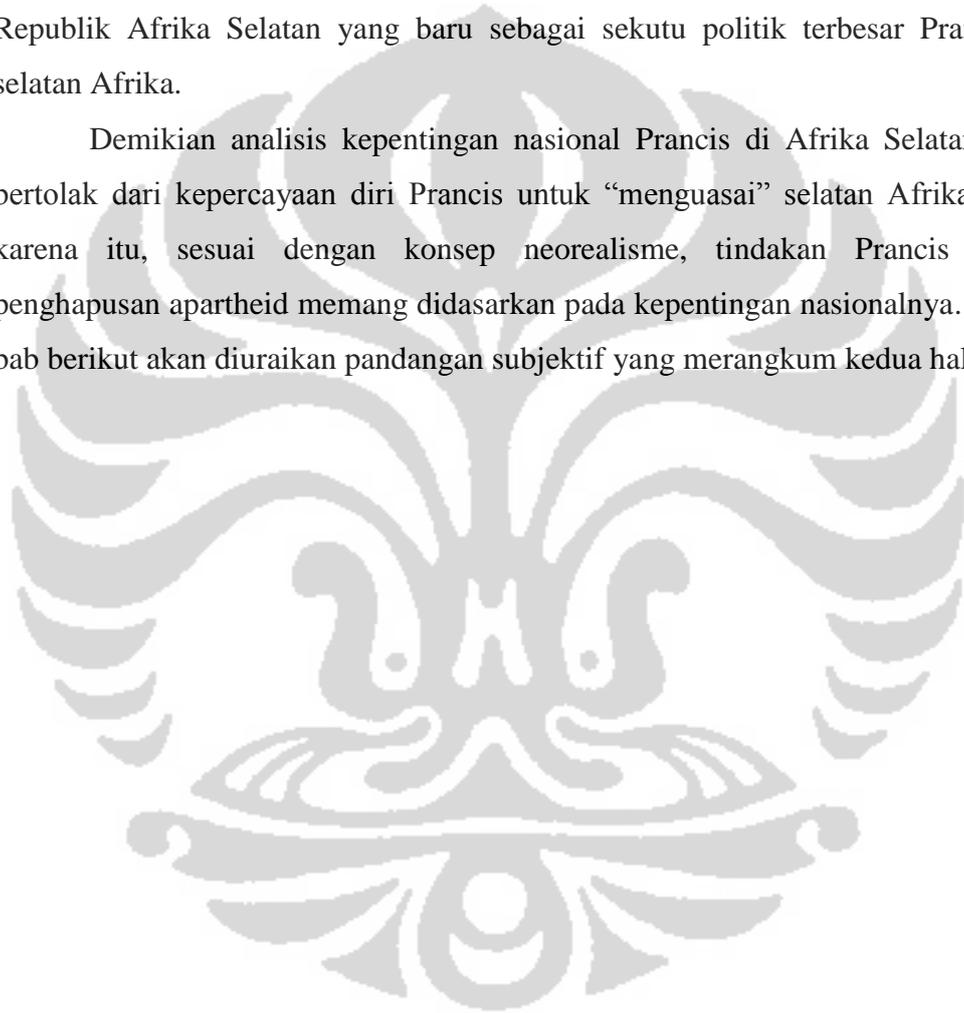
Selain berupaya menggulingkan rezim Pretoria, Prancis kemudian juga berupaya memutus pengaruh pemerintah Afrika Selatan di Namibia. Pada awalnya, Mitterand terpengaruh oleh Lionel Jospin (yang saat itu menjabat sebagai SekJen PS) bahwa sudah saatnya Prancis tidak “membela” Afrika terus menerus sehingga Mitterand memutuskan bahwa Prancis resmi keluar dari *Contact Group*, sebuah institusi PBB yang mengurus proses kemerdekaan Namibia dari Afrika Selatan (Whiteman 334). Prancis kemudian menjadi bersemangat menekan pemerintah Afrika Selatan di Namibia. Prancis mengirim tentaranya yang tergabung dalam tentara perdamaian PBB untuk ditempatkan di Namibia yang bertugas melawan tentara Afrika Selatan dan memberikan senjata kepada organisasi anti-apartheid Namibia, SWAPO. Senjata kiriman Prancis itu terdiri dari pesawat Mirages, tank, dan helikopter (Marchand 49).

Keseriusan Prancis masa Mitterand meruntuhkan rezim Pretoria membuat Mitterand masuk dalam daftar tokoh penting sejarah Afrika Selatan. Pada Simposium UNESCO 9 Januari 1997 di Paris, PBB memasukkan sesi khusus peringatan satu tahun kematian Mitterand. Dalam sesi itu, terdapat ucapan terima kasih Mandela (melalui perwakilan Afrika Selatan di UNESCO) kepada Mitterand karena telah membantu dalam penciptaan Republik Afrika Selatan yang baru (<http://www.un.org/>).

Dengan demikian, Prancis masa Mitterand bersemangat menggunakan segenap kemampuannya untuk turut andil dalam agenda PBB menghapus apartheid agar mendapatkan simpati dari organisasi pergerakan antiapartheid yang para anggotanya akan menduduki kursi mayoritas di parlemen Afrika Selatan. Prancis menjaga kemakmuran ekonomi warga negaranya dengan mempertahankan sembilan puluh perusahaan nasional di Afrika Selatan sekaligus menjadikan Afrika Selatan sebagai pintu gerbang untuk “mendapatkan” Afrika bagian selatan sehingga Prancis tidak mau pemerintah Pretoria yang baru menjalin kerja sama dengan pemerintah Rusia. Prancis yakin ada keuntungan ketika

Prancis membela kaum non-kulit putih Afrika Selatan, yaitu penanaman kembali investasi yang sebelumnya telah ditarik dari Republik Afrika Selatan yang lama untuk ditanam kembali di Republik Afrika Selatan yang baru. Keuntungan itu dinyatakan Presiden Mandela pada 13 Juli 1996 kepada wartawan *Le Monde* bahwa Republik Afrika Selatan yang baru setuju melanjutkan kerja sama Prancis-Afrika Selatan (<http://www.lemonde.fr/>). Prancis masa Chirac kemudian mendapat “warisan ‘la grandeur de la France’” Mitterand di Afrika, yaitu negara Republik Afrika Selatan yang baru sebagai sekutu politik terbesar Prancis di selatan Afrika.

Demikian analisis kepentingan nasional Prancis di Afrika Selatan yang bertolak dari kepercayaan diri Prancis untuk “menguasai” selatan Afrika. Oleh karena itu, sesuai dengan konsep neorealisme, tindakan Prancis dalam penghapusan apartheid memang didasarkan pada kepentingan nasionalnya. Dalam bab berikut akan diuraikan pandangan subjektif yang merangkum kedua hal itu.



BAB 5

KESIMPULAN

Apartheid Afrika Selatan bertentangan dengan konsep HAM negara Prancis sehingga pemerintah Prancis tampil sebagai wakil warga negaranya di PBB untuk menghapus apartheid. Secara polemologis, apartheid Afrika Selatan mustahil dihapuskan tanpa peran Prancis. Namun, ketidakkonsistenan Prancis dalam penerapan resolusi DK PBB pada masa itu terjadi karena lobi politis Afrika Selatan yang juga berhasil di Prancis. Pada saat itu, Prancis melakukan segala peran DK PBB untuk menghapuskan apartheid, tetapi tidak menghentikan kerja sama ekonomi dan militer dengan pemerintah rasialis Pretoria.

Ketika rezim Pretoria masih berkuasa, Prancis berupaya menghapus apartheid dalam agenda PBB tanpa mengabaikan kepentingannya di Afrika Selatan. Prancis tetap mempertahankan hubungan bilateral dengan rezim itu yang diejawantahkan dalam kerja sama ekonomi dan militer. Namun, pengunduran diri Presiden Botha, yang menandakan keruntuhan rezim Pretoria pada akhir dekade 1980, membuat Prancis bersemangat untuk menekan sisa-sisa kekuatan rezim Pretoria dengan membatasi investasi ekonomi dan militer Prancis ke Afrika Selatan. Prancis kemudian meminta Presiden Afrika Selatan antiapartheid, de Klerk, agar mengunjungi Paris pertama kali sebelum ia berkunjung ke negara Eropa lain sebagai bagian tur anti-apartheid dan menjadikan Paris sebagai mediator utama antara pemerintah de Klerk dan organisasi-organisasi pergerakan antiapartheid.

Pada saat itu, Prancis berhasil tampil sebagai satu-satunya anggota tetap DK PBB yang berperan besar dalam penghapusan apartheid dan pembentukan Republik Afrika Selatan yang baru. Jika tidak mengintervensi konflik apartheid, Prancis kehilangan kepercayaan pemerintahan mayoritas nonkulit putih Afrika Selatan dan negara-negara Afrika bagian selatan yang semuanya antiapartheid. Prancis bertujuan menarik simpati kaum nonkulit putih itu, yang nantinya mendapat kursi mayoritas di pemerintahan Afrika Selatan, karena negara itu sebenarnya hanya ingin menjaga hubungan baik dengan Afrika Selatan, baik sebelum maupun sesudah apartheid dihapuskan. Prancis sadar betul bahwa Afrika

Selatan adalah negara yang paling makmur dan sangat menguntungkan. Prancis kemudian mempertahankan “*connection française*” di Afrika Selatan dengan cara melakukan hubungan bilateral dengan pemerintah Republik Afrika Selatan yang baru. Secara polemologis, Prancis masa Mitterand itu memiliki semangat pasifisme ekonomi atau menganggap perdamaian dapat diraih melalui kerja sama ekonomi.

Demikian penelitian ini disusun untuk menemukan jawaban atas pentingnya kedudukan Afrika Selatan bagi Prancis masa Mitterand. Namun, penelitian ini hanya menggunakan pembedahan polemologis sehingga tidak menyentuh dimensi lain. Oleh karena itu, saya mengharapkan dapat melakukan penelitian selanjutnya.



DAFTAR REFERENSI

- “Afrique du Sud: M. Mitterrand dénonce ‘la véritable négation des droits de l’homme’.” Le Monde 1 Okt. 1989 <<http://www.lemonde.fr>> yang diunduh pada 22 Februari 2010 pukul 11:18.
- “Afrique du Sud Selon M. de Beaucé ‘Un long chemin reste à parcourir’.” Le Monde 11 Mei 1990 <<http://www.lemonde.fr>> yang diunduh pada 22 Februari 2010 pukul 10:37.
- Allain, Jean-Claude, et al., ed. “La Continuité malgré la volonté de rupture: les présidences de François Mitterrand (1981-1995).” Histoire de la diplomatie française: 932-953. France Lonrai: Perrin, 2005.
- Alleg, Henri, et al. La France et L’Apartheid: Documents de la Commission d’Enquête sur l’Apartheid en Afrique du Sud. Paris: L’Harmattan et Droit et Liberté, 1978.
- Anne, Chemin. “A l’appel du comité français ‘Nelson Mandela libre!’ Trois mille personnes ont défilé à Paris pour ‘ne pas relâcher la pression’.” Le Monde 22 Februari 1990 <<http://www.lemonde.fr>> yang diunduh pada 22 Februari 2010 pukul 10:44.
- “Après l’assassinat de Dulcie September L’ambassadeur d’Afrique du Sud a été convoqué à l’Elysée.” Le Monde 1 April 1988 <http://www.lemonde.fr/web/recherche_breve/1,13-0,37-601550,0.html> yang diunduh pada 29 Juni 2010 pukul 12:24.
- Barros, James. PBB: Dulu, Kini, dan Esok. Jakarta: Bumi Aksara, 1990.
- Bharwadaj, KK. Namibia Struggle for Independence. New Delhi: ABP Publishing House, 1989.
- Blade, Toledo. “Mitterrand praises new South Africa.” Sun Journal 5 Juli 1994: 7 <<http://www.news.google/newspapers/>> yang diunduh pada 20 Maret 2010 pukul 14:09.
- Boutros-Ghali, Boutros. An Agenda for Peace. New York: United Nations, 1992.
- Chafer, Tony. “French African Policy: Towards Change.” *African Affairs*: 37-51. Oxford Journals Januari 1992, Vol. 91, No. 362. Oxford University Press on behalf of The Royal African Society.

<<http://www.jstor.org/stable/722561>> yang diunduh pada 2 Februari 2010 pukul 23:48.

Chambon, Frederic. "La France veut nouer des liens privilégiés avec la 'nouvelle' Afrique du Sud." Le Monde 14 Juli 1996 <<http://www.lemonde.fr>> yang diunduh pada 22 Februari 2010 pukul 10:26.

Cole, Alistair. François Mitterand: A Study in Political Leadership. London: Routledge, 1994.

De Barrin, Jacques., Frederic Chambon, dan Serge Marti. "Nelson Mandela, président de la République d'Afrique du Sud." Le Monde 16 Juli 1996 <<http://www.lemonde.fr>> yang diunduh pada 22 Februari 2010 pukul 11:00.

"De Klerk Meets Mitterand on European Tour." Associated Press 11 Mei 1990 <http://www.articles.latimes.com/1990-05-11/news/mn-1256_1_european-tour> yang diunduh pada 22 Februari 2010 pukul 09:24.

Dickson, David. "Reprocessing Spent Nuclear Fuel: The French Connection." *Environmental Research and Management Priorities for the 1980s*: 127-129. *Ambio* 1983, Vol. 12, No. 2. Allen Press on behalf of Royal Swedish Academy of Sciences. <<http://www.jstor.org/stable/4312890>> yang diunduh pada 3 November 2009 pukul 15:47.

Djamily, Drs. Mizwar., Drs. Mulyadi Abdullah, dan Drs. Badril Saleh. Mengenal PBB dan 170 Negara di Dunia. Jakarta: PT. Kreasi Jaya Utama, 1986.

Dunning, Thad. "Conditioning the Effects of Aid: Cold War Politics, Donor Credibility, and Democracy in Africa." *International Organization* 2004, Vol. 58, No. 2: 409-423. Cambridge University Press on behalf of the International Organization Foundation. <<http://www.jstor.org/stable/3877863>> yang diunduh pada 3 November 2009 pukul 15:56.

Georges, Marion. "Première visite d'un chef d'Etat étranger depuis l'investiture de Nelson Mandela à la présidence La venue de M. Mitterand en Afrique du Sud semble déranger les intérêts anglo-saxons." Le Monde 5 Juli 1994

<<http://www.lemonde.fr>> yang diunduh pada 22 Februari 2010 pukul 10:26.

Hauriou, André. Droit Constitutionnel et Institutions Politiques. Paris: Éditions Montchrestein, 1972.

Howorth, Jolyon. "Consensus of Silence: The French Socialist Party and Defence Policy under Francois Mitterrand." *International Affairs* 1984, Vol. 60, No. 4: 579-600. Blackwell Publishing on behalf of the Royal Institute of International Affairs.

<<http://www.jstor.org/stable/2620043>> yang diunduh pada 2 Februari 2010 pukul 23:47.

---. European Security and Defense Policy. London: Palgrave Macmillan, 2007.

<http://www.daghammarsjokoldlibrary.org/> yang diunduh pada 28 Februari 2010 pukul 17:44.

"International Community Pays Tribute to François Mitterrand at UNESCO Symposium." <<http://www.unesco.org/bpi/eng/un>> yang diunduh pada 20 Maret 2010 pukul 14:05.

Jacob, Prof. Dr. T. Polemologi: Bacaan Tentang Perang dan Damai. Jakarta: Balai Pustaka, 1992.

Jean Pierre, Langellier. "L'évolution du régime de Pretoria et la visite en France du président sud-africain Frederik De Klerk, le converti." Le Monde 11 Mei 1990 <<http://www.lemonde.fr>> yang diunduh pada 22 Februari 2010 pukul 11:00.

"Konflik dalam pendekatan teoritis." <<http://www.pusatperdamaian.com/>> diunduh pada 28 Februari 2010 pukul 19:55.

Kuntowijoyo, Dr. Pengantar Ilmu Sejarah. Yogyakarta: Yayasan Bentang Budaya, 1999.

Maguire, Keith. Politics in South Africa From Vorster to De Klerk. Edinburgh: W&R Chambers Ltd, 1991.

Mandela, Nelson. Perjalanan Panjang Menuju Kebebasan: Otobiografi Nelson Mandela. Jakarta: Binarupa Aksara, 1995.

- Marchand, Jacques. "Namibia and Government of France." *Namibia and the West: Multinational Corporations and International Law*: 45-50. *Africa Today* 1983, Vol.30, No.1/2. Indiana University Press.
<<http://www.jstor.org/stable/4186142>> yang diunduh pada 6 Oktober 2009 pukul 16:02.
- Martin, Guy. "The Historical, Economic, and Political Bases of France's African Policy." *The Journal of Modern African Studies* Juni 1985, Vol. 23, No. 2: 189-208. Cambridge University.
<<http://www.jstor.org/stable/160570>> yang diunduh pada 17 Oktober 2009 pukul 12:23.
- Michel, Bole Richard. "Le chef de l'Etat sud-africain à l'Elysée Paris veut conforter le président De Klerk." Le Monde 10 Mei 1990
<<http://www.lemonde.fr>> yang diunduh pada 22 Februari 2010 pukul 10:37.
- . "L'accueil de M. Nelson Mandela à Paris par M. François Mitterrand 'Le prisonnier qui guide ses geôliers sur les chemins de la liberté'." Le Monde 8 Juni 1990 <<http://www.lemonde.fr>> yang diunduh pada 22 Februari 2010 pukul 10:43.
- Moïsi, Dominique. "Mitterrand's Foreign Policy: The Limits of Continuity." *Foreign Affairs* 1981, Vol. 60, No. 2: 347-357. Council on Foreign Relations.
<<http://www.jstor.org/stable/20041084>> yang diunduh pada 2 Februari 2010 pukul 11:47.
- Nash, Elizabeth. "The Week Ahead: Mitterrand Visit to SA aims to boost economic links." Independent 4 Juli 1994
<<http://www.independent.co.uk/news/world/the-week-ahead-mitterrand-visit-to-sa-aims-to-boost-economic-links-1411491.html>> yang diunduh pada 22 Februari 2010 pukul 09:32.
- Olsen, Gorm Rye. "Europe and the Promotion of Democracy in Post Cold War Africa: How Serious is Europe and for What Reason?." *African Affairs* Juli 1998, Vol. 97, No. 388: 343-367. Oxford University Press on behalf of The Royal African Society.

<<http://www.jstor.org/stable/723214>> yang diunduh pada 3 November 2009 pukul 15:56.

Pickles, Dorothy. "France and The United Nations." The Uneasy Entente: French Foreign Policy and Franco-British Misunderstanding 127-133. London: Oxford University Press, 1966.

"Pour protester contre l'incarcération de Pierre-André Albertini M. Mitterrand va refuser les lettres de créances du nouvel ambassadeur sud-africain." Le Monde 20 Juni 1987 <http://www.lemonde.fr/web/recherche_breve/1,13-0,37-570872,0.html> yang diunduh pada 22 Februari 2010 pukul 10:54.

Reddy, E.S. "Apartheid and the International Community." *A Journal of Opinion* 1974, Vol. 4, No. 3: 19-24. African Studies Association.
<<http://www.jstor.org/stable/1166689>> yang diunduh pada 27 Oktober 2009 pukul 12:28.

"Republic of South Africa Constitution Act 110 of 1983." <<http://www.info.gov.za/documents/index.htm>> yang diunduh pada 10 April 2010 pukul 18:02.

"Republic of South Africa Constitution Act 110" <<http://www.nelsonmandela.org>> yang diunduh pada 10 April 2010 pukul 18:04.

Sakarai, L.J.M "Apartheid Ideology and Capitalist Growth in South Africa." *Economic and Political Weekly* 9 Oktober 1976, Vol. 11, No. 41.
<<http://www.jstor.org/stable/4364997>> yang diunduh pada 27 Oktober 2009 pukul 12:37.

Salvadori, Massimo. NATO: A Twentieth-Century Community of Nations. Princeton, New York: D. Van Nostrand Company Inc., 1957.

Santoso, Drs. Loekito. Polemologi: Peranti Kuantitatif dan Kualitatif Trilogi Perdamaian. Bandung: PT. Remaja Rosdakarya, 1991.

Shadily, Hassan, M.A, et al., ed. Ensiklopedi Umum. Yogyakarta: Kanisius, 1991.

"South Africa Table of Contents." <<http://www.countrystudies.us/south-afrc>> yang diunduh pada 22 Februari 2010 pukul 09:13.

“Subjects of UN Security Council Vetoes.” <<http://www.globalpolicy.org/>> yang diunduh pada 29 September 2009 pukul 14:31.

Suryokusumo, Sumaryo. Organisasi Internasional. Depok: UI Press, 1987.

---. Pengantar Hukum Organisasi Internasional. Ciputat: PT. Tatanusa, 2007.

“The day I ended apartheid.” *Independent News*. London.

<africafiles.org/afinfoserv.asp> yang diunduh pada 22 Februari 2010 pukul 09:51.

The World Almanac 2009. New York: A Reader’s Digest Company, 2009.

“Umkhonto we Sizwe-Timeline.” <<http://www.sahistory.org.za/pages/>> yang diunduh pada 10 April 2010 pukul 17:54.

United Nations. “Apartheid.” United Nations XXXth Anniversary: Basic Facts of the United Nations: 35-38. New York: United Nations Publication, 1975.

---. Pengetahuan Dasar Mengenai Perserikatan Bangsa-bangsa. Jakarta: Kantor Penerangan Perserikatan Bangsa-bangsa.

---. The United Nations and Apartheid 1948-1994. New York: United Nations Departement of Public Administration, 1994.

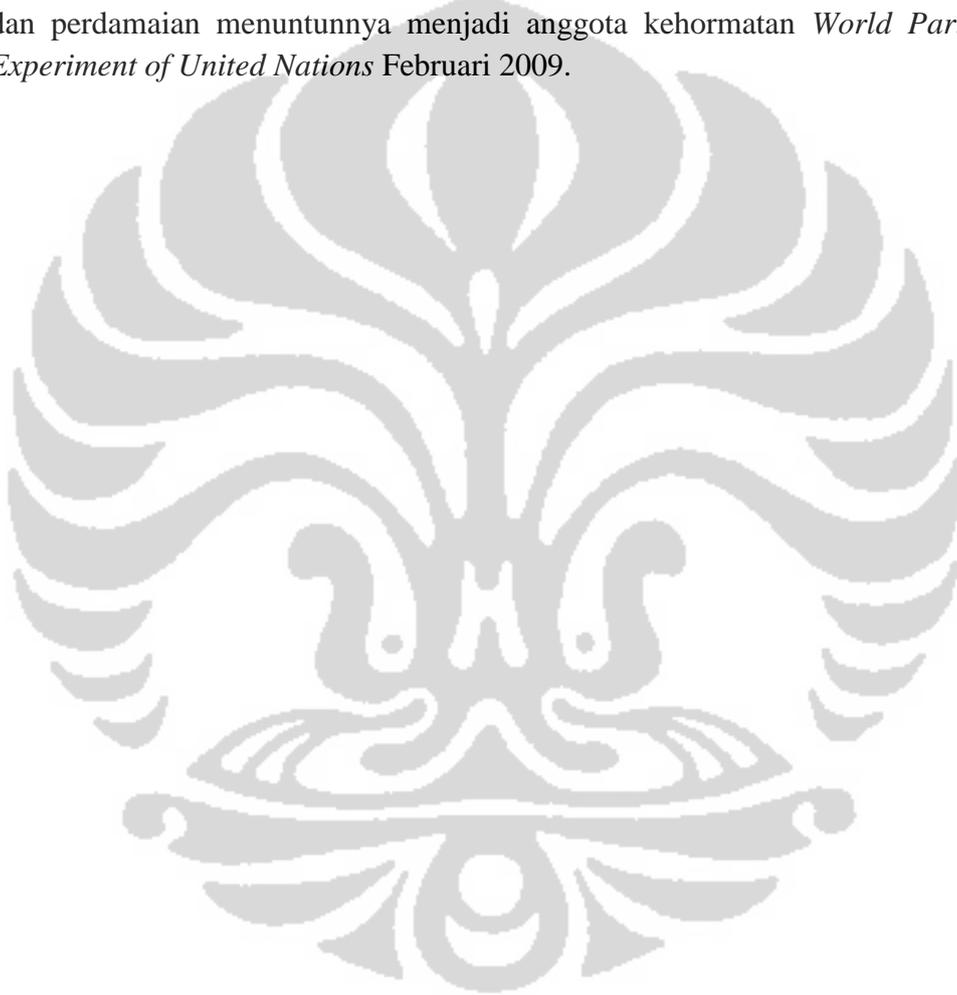
Whiteman, Kaye. “President Mitterrand and Africa.” *African Affairs* Juli 1983, Vol. 82, No. 328: 329-343. Oxford University Press on behalf of The Royal African Society.

<<http://www.jstor.org/stable/722068>> yang diunduh pada 2 Februari 2010 pukul 11:47.

Biodata Penulis



Penulis skripsi ini bernama Jeanne Françoise yang lahir di Jakarta, 1 September 1989. Jeanne bersekolah di TK dan SD Taman Siswa Matraman milik Ki Hadjar Dewantoro, kemudian melanjutkan di SMP dan SMA Fons Vitae I milik Yayasan Pendidikan Katolik Marsudirini. Pada 2006, penulis melanjutkan jenjang sarjana di Sastra Prancis FIB UI. Minatnya akan politik dan perdamaian menuntunnya menjadi anggota kehormatan *World Parliament Experiment of United Nations* Februari 2009.



LAMPIRAN

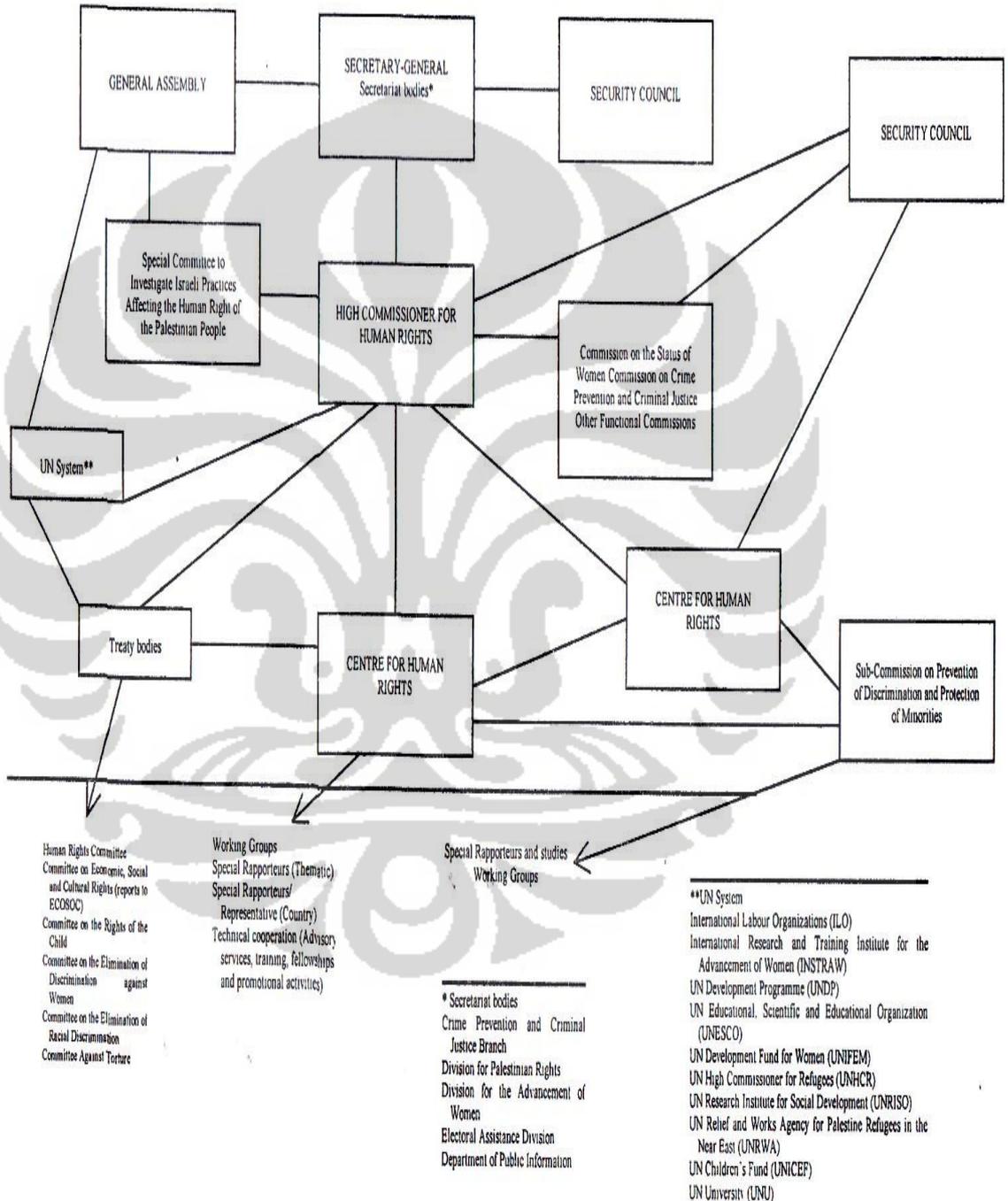
Lampiran 1. Piagam PBB (Suryokusumo 135)

Functions and Powers

Article 24

1. In order to ensure prompt and effective action by the United Nations, its Members confer on the Security Council primary responsibility for the maintenance of international peace and security, and agree that in carrying out its duties under this responsibility the Security Council acts on their behalf.
2. In discharging these duties the Security Council shall act in accordance with the Purposes and Principles of the United Nations. The specific powers granted to the Security Council for the discharge of these duties are laid down in Chapters VI, VII, VIII, and XII.
3. The Security Council shall submit annual and, when necessary, special reports to the General Assembly for its consideration.

The United Nations human rights system



— Reading No. 6 —

FRENCH CHARTERS OF LIBERTY

A—DECLARATION OF THE
RIGHTS OF MAN (1789)

Art. 1—Men are born and live free and equal under law. Social distinctions can be based only on the general utility.

Art. 2—The aim of all political association is the conservation of the natural and imprescriptible rights of man. These rights are: liberty, prosperity, security and resistance to oppression.

Art. 3—The principle of all sovereignty resides essentially in the Nation. No body, no individual can exercise any authority which has not been expressly given by the nation.

Art. 4—Liberty consists in being able to do anything which does not harm others. Thus, the exercise of the natural rights of every man has no limits other than those which ensure the enjoyment of the same rights to the other members of the society. These limits can only be decided by law. . . .

Art. 9—Every man being presumed innocent until he has been proved guilty, if it be considered necessary to arrest him, all rigors which are not necessary for the holding of his person must be severely punished by law. . . .

Art. 10—No person may be disturbed on account of his opinions, even his religious opinions, so long as the expression of them does not disturb the public order established by law.

Lampiran 4. Peta Afrika bagian selatan (Maguire 4)

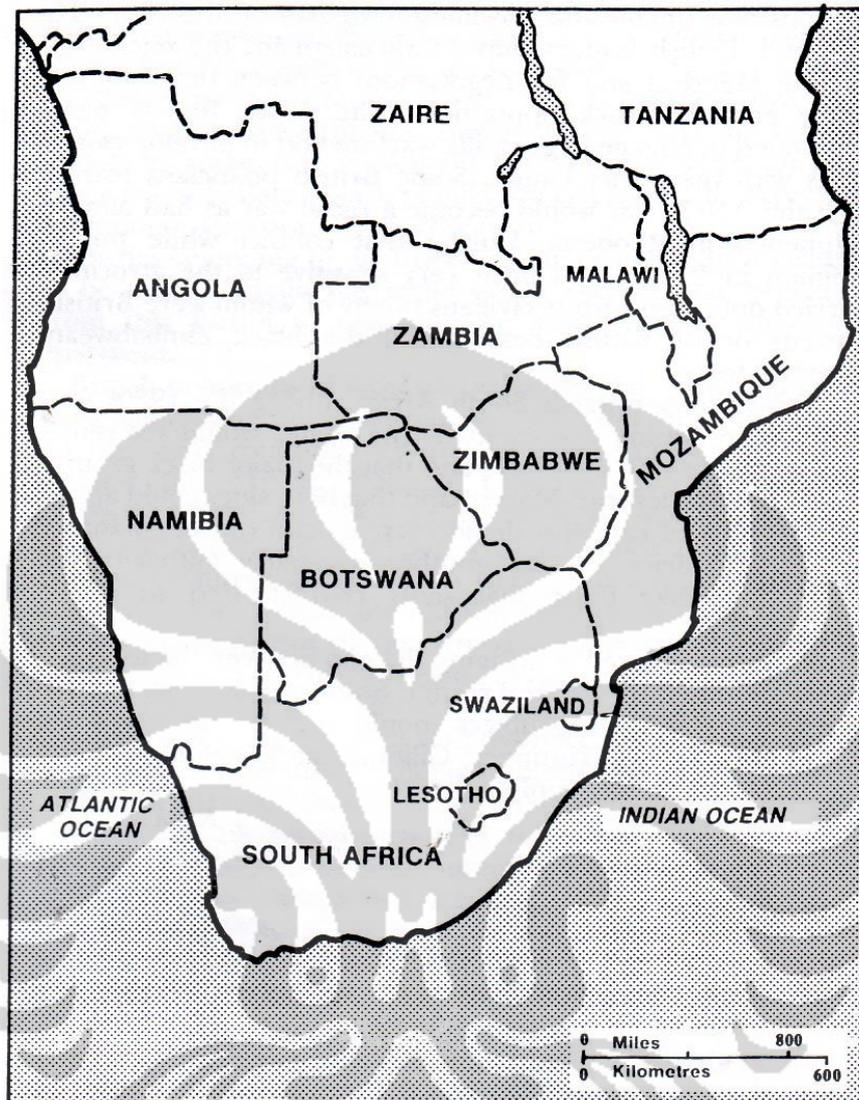


Figure 1 Southern Africa

Lampiran 5. 14 Resolusi DK PBB untuk Afrika Selatan yang disetujui

Prancis masa Mitterand (<http://www.daghammarsjkkoldlibrary.org/>)

Resolution 503 (1982)

of 9 April 1982

The Security Council,

Recalling its resolution 473 (1980) and its statement of 5 February 1981⁶³ regarding the death sentences passed by the Transvaal Division of the Supreme Court at Pretoria on Ncimbithi Johnson Lubisi, Petrus Tsepo Mashigo and

Naphtali Manana, three members of the African National Congress of South Africa,

Gravely concerned at the confirmation of the death sentences by the South African Court of Appeal on 7 April 1982,

Deeply concerned that the carrying out of the death sentences would further aggravate the situation in South Africa,

1. *Calls upon* the South African authorities to commute the death sentences;
2. *Urges* all States and organizations to use their influence and to take urgent measures in conformity with the Charter of the United Nations, the resolutions of the Security Council and relevant international instruments to save the lives of the three men.

Resolution 525 (1982)

of 7 December 1982

The Security Council,

Having considered the question of the death sentences passed on 19 August 1981 in South Africa on Mr. Anthony Tsotsobe, Mr. Johannes Shabangu and Mr. David Moise,

Recalling its statement of 4 October 1982⁶⁵ regarding the death sentences passed on 6 August 1982 in South Africa on Mr. Thelle Simon Mogoerane, Mr. Jerry Semano Mosololi and Mr. Marcus Thabo Motaung, members of the African National Congress of South Africa, and reiterating its urgent appeal for executive clemency in this case,

Gravely concerned at the confirmation by the Appellate Division of the Supreme Court of South Africa on 26 November 1982 of the death sentences imposed on Mr. Anthony Tsotsobe, Mr. Johannes Shabangu and Mr. David Moise,

Conscious that the carrying out of the death sentences will further aggravate the situation in South Africa,

1. *Calls upon* the South African authorities to commute the death sentences imposed on the six men;
2. *Urges* all States and organizations to use their influence and to take urgent measures, in conformity with the Charter of the United Nations, the resolutions of the Security Council and relevant international instruments, to save the lives of the six men.

Resolution 533 (1983)

of 7 June 1983

The Security Council,

Having considered the question of the death sentences passed on 6 August 1982 in South Africa on Mr. Thelle Simon Mogoerane, Mr. Jerry Semano Mosololi and Mr. Marcus Thabo Motaung, members of the African National Congress of South Africa,

Recalling its statement of 4 October 1982⁵² as well as its resolution 525 (1982) appealing for executive clemency in this case,

Gravely concerned over the decision of the South African authorities on 6 June 1983 to refuse executive clemency in respect of the three men,

Conscious that the carrying out of the death sentences will aggravate the situation in South Africa,

1. *Calls upon* the South African authorities to commute the death sentences imposed on the three men;

2. *Urges* all States and organizations to use their influence and to take urgent measures, in conformity with the Charter of the United Nations, the resolutions of the Security Council and relevant international instruments, to save the lives of the three men.

Resolution 547 (1984)

of 13 January 1984

The Security Council,

Having considered the question of the death sentence passed on 6 June 1983 in South Africa on Mr. Malesela Benjamin Maloise,

Recalling its resolutions 503 (1982), 525 (1982) and 533 (1983),

Gravely concerned over the current decision of the South African authorities to reject an appeal against the death sentence imposed upon Mr. Maloise,

Conscious that carrying out the death sentence will further aggravate the situation in South Africa,

1. *Calls upon* the South African authorities to commute the death sentence imposed upon Mr. Maloise;

2. *Urges* all States and organizations to use their influence and to take urgent measures, in accordance with the Charter of the United Nations, the resolutions of the Security Council and relevant international instruments, to save the life of Mr. Malesela Benjamin Maloise.

Resolution 558 (1984)

of 13 December 1984

The Security Council,

Recalling its resolution 418 (1977), in which it decided upon a mandatory arms embargo against South Africa,

Recalling its resolution 421 (1977), by which it entrusted a Committee consisting of all its members with the task of, among other things, studying ways and means by which the mandatory arms embargo could be made more effective against South Africa and to make recommendations to the Council,

Taking note of the Committee's report to the Security Council contained in document S/14179 of 19 September 1980,

Recognizing that South Africa's intensified efforts to build up its capacity to manufacture armaments undermines the effectiveness of the mandatory arms embargo against South Africa,

Considering that no State should contribute to South Africa's arms-production capability by purchasing arms manufactured in South Africa,

1. *Reaffirms* its resolution 418 (1977) and stresses the continuing need for the strict application of all its provisions;
2. *Requests* all States to refrain from importing arms, ammunition of all types and military vehicles produced in South Africa;
3. *Requests* all States, including States not Members of the United Nations, to act strictly in accordance with the provisions of the present resolution;
4. *Requests* the Secretary-General to report to the Security Council Committee established by resolution 421 (1977) concerning the question of South Africa on the progress of the implementation of the present resolution before 31 December 1985.

Resolution 560 (1985)

of 12 March 1985

The Security Council,

Recalling its resolutions 473 (1980), 554 (1984) and 556 (1984), which, *inter alia*, demanded the cessation of

the uprootings, relocation and denationalization of the indigenous African people,

Noting with deep concern the aggravation of the situation in South Africa resulting from repeated killings of defenceless opponents of *apartheid* in various townships all over South Africa and, most recently, the killing of African demonstrators against forced removals at Crossroads,

Gravely concerned by the arbitrary arrests of members of the United Democratic Front and other mass organizations opposed to the *apartheid* régime,

Deeply concerned by the preferment of charges of "high treason" on Mrs. Albertina Sisulu, Mr. Archie Gumede, Mr. George Sewpershad, Mr. M. J. Naidoo, the Reverend Frank Chikana, Professor Ismael Mohammed, Mr. Mewa Ramgobin, Mr. Cassim Saloojee, Mr. Paul David, Mr. Essop Jasset, Mr. Curtis Nkondo, Mr. Aubrey Mokoena, Mr. Thomazile Qweta, Mr. Sisa Njikelana, Mr. Sam Kikine and Mr. Isaac Ngcobo, officials of the United Democratic Front and other opponents of *apartheid* for their participation in the non-violent campaign for a united non-racial and democratic South Africa,

Aware that racist South Africa's intensified repression and charges of "high treason" against leading opponents of *apartheid* constitute an effort further to entrench racist minority rule,

Concerned that repression further undermines the possibilities of a peaceful solution of the South African conflict,

Concerned over racist South Africa's policy of the uprooting, denationalization and dispossession of three

and a half million indigenous African people to date, thus swelling the ranks of the other millions already doomed to permanent unemployment and starvation,

Noting with indignation that South Africa's policy of bantustanization is also aimed at the creation of internal bases for the fomenting of fratricidal conflict,

1. *Strongly condemns* the Pretoria régime for the killing of defenceless African people protesting against their forced removal from Crossroads and other places;
2. *Strongly condemns* the arbitrary arrests by the Pretoria régime of members of the United Democratic Front and other mass organizations opposed to South Africa's policy of *apartheid*;
3. *Calls upon* the Pretoria régime to release unconditionally and immediately all political prisoners and detainees, including Nelson Mandela and all other black leaders with whom it must deal in any meaningful discussion of the future of the country;
4. *Also calls upon* the Pretoria régime to withdraw the charges of "high treason" instituted against the United Democratic Front officials, and calls for their immediate and unconditional release;
5. *Commends* the massive united resistance of the oppressed people of South Africa against *apartheid*, and reaffirms the legitimacy of their struggle for a united, non-racial and democratic South Africa;
6. Requests the Secretary-General to report to the Security Council on the implementation of the present resolution;
7. *Decides* to remain seized of the matter.

Resolution 591 (1986)

of 28 November 1986

The Security Council,

Recalling its resolution 418 (1977), in which it decided upon a mandatory arms embargo against South Africa,

Recalling its resolution 421 (1977), by which it entrusted a committee consisting of all the members of the Council with the task of, among other things, studying ways and means by which the mandatory arms embargo could be made more effective against South Africa and to make recommendations to the Council,

Recalling its resolution 473 (1980) on the question of South Africa,

Recalling the 1980 report of the Security Council Committee established by resolution 421 (1977) concerning the question of South Africa on ways and means of making the mandatory arms embargo against South Africa more effective,⁷⁰

Recalling resolution 558 (1984), in which all States were requested to refrain from importing arms, ammunition of all types and military vehicles produced in South Africa,

Recalling further resolution 473 (1980), by which the Security Council requested the Security Council Committee established by resolution 421 (1977) to redouble its efforts to secure full implementation of the arms embargo against South Africa by recommending measures to close all loopholes in the arms embargo, reinforce it and make it more comprehensive,

Reaffirming its recognition of the legitimacy of the struggle of the South African people for the elimination of *apartheid* and the establishment of a democratic society in accordance with their inalienable human and political rights as set forth in the Charter of the United Nations and the Universal Declaration of Human Rights,

Strongly condemning the racist régime of South Africa for further aggravating the situation and its massive repression against all opponents of *apartheid*, for the killing of peaceful demonstrators and political detainees, and for its defiance of General Assembly and Security Council resolutions, in particular Security Council resolution 417 (1977),

Reaffirming its resolution 418 (1977) and stressing the continuing need for strict application of all its provisions,

Mindful of its responsibilities under the Charter for the maintenance of international peace and security,

1. *Urges* States to take steps to ensure that components of embargoed items do not reach the South African military establishment and police through third countries;

2. *Calls upon* States to prohibit the export of spare parts for embargoed aircraft and other military equipment belonging to South Africa and any official involvement in the maintenance and service of such equipment;

3. *Urges* all States to prohibit the export to South Africa of items which they have reason to believe are destined for the military and/or police forces of South Africa, have a military capacity and are intended for military purposes, namely, aircraft, aircraft engines, aircraft parts, electronic and telecommunication equipment, computers and four-wheel drive vehicles;

(lanjutan)

4. *Requests* of all States that henceforth the term "arms and related *matériel*" referred to in resolution 418 (1977) shall include, in addition to all nuclear, strategic and conventional weapons, all military, paramilitary police vehicles and equipment, as well as weapons and ammunitions, spare parts and supplies for the aforementioned and the sale or transfer thereof;

5. *Requests* all States to implement strictly its resolution 418 (1977) and to refrain from any co-operation in the nuclear field with South Africa which will contribute to the manufacture and development by South Africa of nuclear weapons or nuclear explosive devices;

6. *Renews its request* to all States to refrain from importing arms, ammunition of all types and military vehicles produced in South Africa;

7. *Calls upon* all States to prohibit the import or entry of all South African armaments for display in international fairs and exhibitions under their jurisdiction;

8. *Further calls upon* States which have not done so to put an end to exchanges as well as to visits and exchanges of visits by government personnel, when such visits and exchanges maintain or increase South Africa's military or police capabilities;

9. *Further calls upon* all States to refrain from participating in any activities in South Africa which they have reason to believe might contribute to its military capability;

10. *Requests* all States to ensure that their national legislation or comparable policy directives guarantee that specific provisions to implement resolution 418 (1977) include penalties to deter violations;

11. *Further requests* all States to adopt measures to investigate violations, prevent future circumventions and strengthen their machinery for the implementation of resolution 418 (1977) with a view to the effective monitoring and verification of transfers of arms and other equipment in violation of the arms embargo;

12. *Further requests* all States, including States non-members of the United Nations, to act in accordance with the provisions of the present resolution;

13. *Further requests* the Security Council Committee established by resolution 421 (1977) concerning the question of South Africa, in pursuance of resolution 418 (1977), to continue its efforts to secure full implementation of the arms embargo against South Africa in order to make it more effective;

14. *Further requests* the Secretary-General to report to the Security Council on the progress of the implementation of the present resolution, the first report to be submitted as soon as possible but in any event no later than 30 June 1987;

15. *Decides* to remain seized of the matter.

Resolution 610 (1988)
of 16 March 1988

The Security Council,

Recalling its resolutions 503 (1982) of 9 April 1982, 525 (1982) of 7 December 1982, 533 (1983) of 7 June 1983 and 547 (1984) of 13 January 1984 in which, *inter alia*, it expressed its grave concern that the Pretoria régime's practice of sentencing to death and executing its opponents has adverse consequences on the search for a peaceful resolution of the South African situation,

Gravely concerned at the deteriorating situation in South Africa, the worsening human suffering resulting from the *apartheid* system and, *inter alia*, the South African régime's renewed state of emergency, its imposition on 24 February 1988 of severe restrictions on eighteen anti-*apartheid* and labour organizations and eighteen individuals committed to peaceful forms of struggle and the harassment and detention of church leaders on 29 February, all of which further undermine the possibilities of a peaceful resolution of the South African situation,

Having considered the question of the death sentences passed on 12 December 1985 in South Africa on Mojalefa Reginald Sefatsa, Reid Malebo Mokoena, Oupa Moses Diniso, Theresa Ramashamola, Duma Joseph Khumalo and Francis Don Mokhesi, known as the Sharpeville Six, as well as the decision to execute them on Friday, 18 March 1988,

Conscious that the Court proceedings of the Sharpeville Six show that none of the six young South Africans convicted of murder was found by the Court to have caused the actual death of the Councillor and that they were convicted of murder and sentenced to death only because the Court found that they had a "common purpose" with the actual perpetrators,

Deeply concerned at the Pretoria régime's decision to execute the Sharpeville Six on Friday, 18 March 1988, in defiance of world-wide appeals,

Convinced that these executions, if carried out, will further inflame an already grave situation in South Africa,

1. *Calls upon* the South African authorities to stay execution and commute the death sentences imposed on the Sharpeville Six;

2. *Urges* all States and organizations to use their influence and take urgent measures, in conformity with the Charter of the United Nations, the resolutions of the Security Council and relevant international instruments, to save the lives of the Sharpeville Six.

Resolution 615 (1988)
of 17 June 1988

The Security Council,

Recalling its resolutions 503 (1982) of 9 April 1982, 525 (1982) of 7 December 1982, 533 (1983) of 7 June 1983, 547 (1984) of 13 January 1984 and 610 (1988) of 16 March 1988 in which, *inter alia*, it expressed its grave concern that the Pretoria régime's practice of sentencing to death and executing its opponents has adverse consequences on the search for a peaceful resolution of the South African situation,

Gravely concerned at the deteriorating situation in South Africa, the worsening human suffering resulting from the *apartheid* system and, *inter alia*, the South African régime's renewed state of emergency on 9 June 1988, its imposition on 24 February 1988 of severe restrictions on eighteen anti-*apartheid* and labour organizations and eighteen individuals committed to peaceful forms of struggle and the harassment and detention of church leaders on 29 February, all of which further undermine the possibilities of a peaceful resolution of the South African situation,

Having considered the question of the death sentences passed on 12 December 1985 in South Africa on Mojalefa Reginald Sefatsa, Reid Malebo Mokoena, Oupa Moses Diniso, Theresa Ramashamola, Duma Joseph Khumalo and Francis Don Mokhesi, known as the Sharpeville Six, as well as the decision to execute them,

Conscious that the Court proceedings of the Sharpeville Six show that none of the six young South Africans convicted of murder was found by the Court to have caused

the actual death of the Councillor and that they were convicted of murder and sentenced to death only because the Court found that they had a "common purpose" with the actual perpetrators,

Deeply concerned at the decision on 13 June 1988 of the Pretoria Supreme Court to reject an appeal to reopen the case to ensure a fair trial,

Deeply concerned also at the Pretoria régime's decision to execute the Sharpeville Six in defiance of world-wide appeals,

Convinced that these executions, if carried out, will further inflame an already grave situation in South Africa,

1. *Calls once again upon* the South African authorities to stay execution and commute the death sentences imposed on the Sharpeville Six;

2. *Urges* all States and organizations to use their influence and take urgent measures, in conformity with the Charter of the United Nations, the resolutions of the Security Council and relevant international instruments, to save the lives of the Sharpeville Six.

Resolution 765 (1992)
of 16 July 1992

The Security Council,

Recalling its resolutions 392 (1976) of 19 June 1976, 473 (1980) of 13 June 1980, 554 (1984) of 17 August 1984 and 556 (1984) of 23 October 1984,

Gravely concerned by the escalating violence in South Africa, which is causing a heavy loss of human life and by its consequences for the peaceful negotiations aimed at creating a democratic, non-racial and united South Africa,

Concerned that the continuation of this situation would seriously jeopardize peace and security in the region,

Recalling the Declaration on Apartheid and its Destructive Consequences in Southern Africa³⁴⁶ adopted by consensus by the General Assembly at its sixteenth special session, on 14 December 1989, which called for negotiations in South Africa to take place in a climate free of violence,

Emphasizing the responsibility of the South African authorities to take all necessary measures to stop the violence immediately and protect the life and property of all South Africans,

Emphasizing also the need for all parties to cooperate in combating violence and to exercise restraint,

Concerned at the break in the negotiating process and determined to help the people of South Africa in their legitimate struggle for a non-racial, democratic society,

1. *Condemns* the escalating violence in South Africa and in particular the massacre at Boipatong township on 17 June 1992, as well as subsequent incidents of violence, including the shooting of unarmed protesters;
2. *Strongly urges* the South African authorities to take immediate measures to bring an effective end to the ongoing violence and to bring those responsible to justice;
3. *Calls upon* all the parties to cooperate in combating violence and to ensure the effective implementation of the National Peace Accord;³⁴⁷
4. *Invites* the Secretary-General to appoint, as a matter of urgency, a Special Representative for South Africa in order to recommend, after, *inter alia*, discussion with the parties, measures which would assist in bringing an effective end to the violence and in creating conditions for negotiations leading towards a peaceful transition to a democratic, non-racial and united South Africa, and to submit a report to the Security Council as early as possible;
5. *Urges* all parties to cooperate with the Special Representative of the Secretary-General in carrying out his mandate, and to remove the obstacles to the resumption of negotiations;
6. *Underlines*, in this regard, the importance of all parties cooperating in the resumption of the negotiating process as speedily as possible;
7. *Urges* the international community to maintain the existing measures imposed by the Council for the purpose of bringing an early end to apartheid in South Africa;
8. *Decides* to remain seized of the matter until a democratic, non-racial and united South Africa is established.

RESOLUTION 772 (1992)

Adopted by the Security Council at its 3107th meeting,
on 17 August 1992

The Security Council,

Reaffirming its resolution 765 (1992) of 16 July 1992,

Having considered the report of the Secretary-General on the question of South Africa (S/24389),

Determined to help the people of South Africa in their legitimate struggle for a non-racial, democratic society,

Cognizant of the expectations of the people of South Africa that the United Nations will assist with regard to the removal of all obstacles to the resumption of the process of negotiations,

Bearing in mind the areas of concern relevant to the question of violence in South Africa, including the issues of the hostels, dangerous weapons, the role of the security forces and other armed formations, the investigation and prosecution of criminal conduct, mass demonstrations and the conduct of political parties,

Further bearing in mind the need to strengthen and reinforce the indigenous mechanisms set up under the National Peace Accord, so as to enhance their capacity in the building of peace, both in the present and in the future,

Determined to assist the people of South Africa to end violence, the continuation of which would seriously jeopardize peace and security in the region,

Underlining, in this regard, the importance of all parties cooperating in the resumption of the negotiating process as speedily as possible,

1. Welcomes with appreciation the report of the Secretary-General of 7 August 1992 (S/24389);
2. Expresses its appreciation to all relevant parties in South Africa for the cooperation they extended to the Special Representative of the Secretary-General;
3. Calls upon the South African Government and all parties in South Africa to implement urgently the relevant recommendations of the Secretary-General contained in his report;
4. Authorizes the Secretary-General to deploy, as a matter of urgency, United Nations observers in South Africa, in such a manner and in such numbers as he determines necessary to address effectively the areas of concern noted in his report, in coordination with the structures set up under the National Peace Accord;
5. Invites the Secretary-General to assist in the strengthening of the structures set up under the National Peace Accord in consultation with the relevant parties;
6. Requests the Secretary-General to report to the Security Council quarterly, or more frequently if necessary, on the implementation of the present resolution;
7. Calls on the Government of South Africa, parties and organizations, and the structures set up under the National Peace Accord, to extend their full cooperation to the United Nations observers to enable them to carry out their tasks effectively;
8. Invites international organizations such as the Organization of African Unity, the Commonwealth and the European Community to consider deploying their own observers in South Africa in coordination with the United Nations and the structures set up under the National Peace Accord;
9. Decides to remain seized of the matter until a democratic, non-racial and united South Africa is established.

RESOLUTION 894 (1994)

Adopted by the Security Council at its 3329th meeting,
on 14 January 1994
The Security Council,
Reaffirming its resolutions 765 (1992) of 16 July 1992 and 772
(1992) of
17 August 1992,
Having considered the report of the Secretary-General on the
question of
South Africa dated 10 January 1994 (S/1994/16),
Welcoming the further progress made in establishing a democratic,
non-racial and united South Africa, and in particular the
establishment of the
Transitional Executive Council and the Independent Electoral
Commission, and the
agreement on the Interim Constitution,
Noting that the legal framework of the electoral process in South
Africa
leading to the elections to be held on 27 April 1994 is defined by
the
Independent Electoral Commission (IEC) and the Electoral Acts, the
Independent
Media Commission Act and the Independent Broadcasting Authority
Act,
Commending the positive contribution already made by the United
Nations
Observer Mission in South Africa (UNOMSA) to the transitional
process in South
Africa and to efforts to curb violence,
Commending also the positive contribution of the Organization of
African
Unity, the Commonwealth and the European Union in this regard,
Reiterating its determination to continue to support the process
of
peaceful democratic change in South Africa for the benefit of all
South
Africans,

Recalling the statement made by the President of the Security
Council on
23 November 1993 (S/26785), in which the Security Council invited
the Secretary-
General to accelerate contingency planning for a possible United
Nations role in
the election process, including coordination with the observer
missions of the
Organization of African Unity, the Commonwealth and the European
Union, to
enable expeditious consideration of a request to the United
Nations for such
assistance,
Noting General Assembly resolutions 48/159 A of 20 December 1993
and 48/230
of 23 December 1993, in which the General Assembly, inter alia,
requested the
Secretary-General to accelerate planning for a United Nations role
in the
election process, in consultation with the Security Council and in
coordination

(lanjutan)

with the observer missions of the Organization of African Unity,
the
Commonwealth and the European Union,
Having considered the request of the Transitional Executive
Council that
the United Nations provide a sufficient number of international
observers to
monitor the electoral process and to coordinate the activities of
the
international observers provided by the Organization of African
Unity, the
Commonwealth and the European Union as well as those provided by
Governments
(S/1994/16), and accepting the need to respond urgently to this
request,

1. Welcomes with appreciation the report of the Secretary-General
of
10 January 1994 and agrees with the proposals contained therein
concerning the
mandate and size of UNOMSA, including the proposals for the
coordination of the
activities of the international observers provided by the
Organization of
African Unity, the Commonwealth and the European Union as well as
those provided
by any other intergovernmental organizations or Governments;
2. Urges all parties in South Africa, including those which did
not
participate fully in the multi-party talks, to respect agreements
reached during
the negotiations, to adhere to democratic principles, and to take
part in the
elections;
3. Calls upon all parties in South Africa to take measures to end
the
violence and intimidation and thus contribute to the conduct of
free and fair
elections, and expects that anyone who seeks to disrupt the
elections will be
held accountable for such actions;
4. Calls also upon all parties in South Africa to respect the
safety and
security of the international observers and to facilitate the
carrying out of
their mandate;
5. Welcomes the intention of the Secretary-General to set up a
special
Trust Fund to finance the participation of additional observers
from Africa and
other developing countries and urges States to contribute
generously to this
Fund;
6. Decides to remain seized of the matter until a democratic, non-
racial
and united South Africa is established.

RESOLUTION 919 (1994)

Adopted by the Security Council at its 3379th meeting,
on 25 May 1994

The Security Council,

Recalling its resolutions on the question of South Africa, in particular resolutions 282 (1970), 418 (1977), 421 (1977), 558 (1984) and 591 (1986),

Welcoming the first all-race multiparty election and the establishment of a united, democratic, non-racial government of South Africa, which was inaugurated on 10 May 1994,

Taking note of the letter of 18 May 1994 from President Nelson R. Mandela

of the Republic of South Africa (S/1994/606, annex),

Stressing the urgent need to facilitate the process of reintegration of South Africa in the international community, including the United Nations system,

1. Decides, acting under Chapter VII of the Charter of the United Nations, to terminate forthwith the mandatory arms embargo and other restrictions related to South Africa imposed by resolution 418 (1977) of 4 November 1977;
2. Decides also to end forthwith all other measures against South Africa contained in resolutions of the Security Council, in particular those referred to in resolutions 282 (1970) of 23 July 1970, 558 (1984) of 13 December 1984 and 591 (1986) of 28 November 1986;
3. Decides further to dissolve the Committee of the Security Council established by resolution 421 (1977) concerning the question of South Africa, in accordance with rule 28 of the provisional rules of procedure of the Security Council, effective from the date of the adoption of the present resolution;
4. Invites all States to consider reflecting the provisions of this resolution as appropriate in their legislation.

RESOLUTION 930 (1994)

Adopted by the Security Council at its 3393rd meeting,
on 27 June 1994

The Security Council,

Recalling its resolutions 772 (1992) of 17 August 1992 and 894
(1994) of

14 January 1994,

Noting with great satisfaction the establishment of a united, non-
racial

and democratic government of South Africa,

Welcoming General Assembly resolutions A/RES/48/13 C and
A/RES/48/258 A of

23 June 1994,

1. Welcomes the final report of the Secretary-General on the
United
Nations Observer Mission in South Africa (UNOMSA) (S/1994/717);
2. Commends the vital role played by the Special Representative of
the
Secretary-General and UNOMSA, together with the Organization of
African Unity,
the Commonwealth and the European Union, in support of the
establishment of a
united, non-racial and democratic South Africa;
3. Decides that, with the successful completion of its mandate,
UNOMSA is
terminated forthwith;
4. Also decides that it has concluded its consideration of the
item
entitled "The question of South Africa" and hereby removes this
item from the
list of matters of which the Council is seized.